



BUKU AJAR

PARIWISATA

BERKELANJUTAN

I Nyoman Sukma Arida

Sustain-press

Daftar Isi

Topik	Hal
1. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan	
2. Konsep Pariwisata Berkelanjutan	
3. Kebocoran Pariwisata	
4. Pariwisata Massal Vs Pariwisata Alternatif	
5. Perubahan Iklim	
6. Biodiversity	
7. Sawah, Subak, dan Sustainable Tourism	
8. Corporate Social Responsible	
9. Tri Hita Karana	
10. Renewable Energy	
11. Ekowisata	
12. Pergeseran Selera Wisatawan	
13. Pariwisata Berbasis Masyarakat	
14. Sampah dan Pariwisata	
15. Trickle Down Effect	
16. Pelestarian Lingkungan dan Green Map	

BAB I

PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: www.sobatpetualang.com

Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Salim, 1990). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (1990) pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu:

- (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources;
- (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya;
- (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun replaceable resource.

Senada dengan konsep tersebut, Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
- b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Dari sisi ekonomi Fauzi (2004) setidaknya ada tiga faktor alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan.

Faktor pertama menyangkut alasan moral, generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama.

Faktor kedua, menyangkut alasan ekologi, keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi

semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.

Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (intergeneration welfare maximization).

Sutamihardja (2004), dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang mungkin dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumberdaya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.

Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citakannya. Namun demikian ada kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum.

Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi ditempat yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Akan tetapi kenyataannya aktivitas produksi yang tinggi dapat saja terjadi bersamaan dengan kemelaratan yang tersebar luas. Kondisi ini dapat membahayakan lingkungan. Jadi pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat terpenuhi kebutuhan dengan cara meningkatkan potensi produksi mereka dan sekaligus menjamin kesempatan yang sama semua orang.

Bagaimana cara hal ini dapat dilakukan? Pemerintah tentunya memerlukan suatu

strategi kebijakan yang realistis dan dapat dilaksanakan disertai dengan sistem pengendalian yang tepat.

Eksplorasi sumber daya alam disarankan sebaiknya pada sumber daya alam yang replaceable atau tergantikan sehingga ekosistem atau sistem lingkungan dapat dipertahankan.

B. PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Memang diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi dan multi-interpretasi.

Menurut Heal, (Fauzi,2004). Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi: Pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Pezzey (1992) melihat aspek keberlanjutan dari sisi yang berbeda. Dia melihat bahwa keberlanjutan memiliki pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan dari sisi statik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah. Karena adanya multidimensi dan multi-interpretasi ini, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi Brundtland yang menyatakan bahwa "Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka."

Ada dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep brunland tersebut. Pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. Kedua, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (well-being) generasi mendatang. Hall (1998) menyatakan bahwa asumsi keberlanjutan paling tidak terletak pada tiga aksioma dasar;

- (1) Perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang;
- (2) Menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap economic wellbeing;

(3) Mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan.

Konsep ini dirasakan masih sangat normatif sehingga aspek operasional dari konsep keberlanjutan ini pun banyak mengalami kendala. Perman et al.,(1997) mencoba mengelaborasi lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan 5 lima alternatif pengertian:

- (1) Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (non-declining consumption),
- (2) Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang,
- (3) Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (natural capital stock) tidak berkurang sepanjang waktu (nondeclining),
- (4) Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (resilience) ekosistem terpenuhi.

Senada dengan pemahaman diatas, Daly (1990) menambahkan beberapa aspek mengenai definisi operasional pembangunan berkelanjutan, antara lain:

- (1) Untuk sumber daya alam yang terbarukan : laju pemanenan harus sama dengan laju regenerasi (produksi lestari)
- (2) Untuk masalah lingkungan : laju pembuangan limbah harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan.
- (3) Sumber energi yang tidak terbarukan harus dieksploitasi secara quasi sustainable, yakni mengurangi laju deplesi dengan cara menciptakan energi substitusi.

Selain definisi operasional diatas, Haris (2000) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman,

- (1) Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu

menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.

- (2) Keberlanjutan lingkungan: Sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.
- (3) Keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

C. STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada lima komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang.

Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti ; meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan, namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai.

Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini.

Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman Pemeliharaan keanekaragaman

hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem.. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.

Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan.

Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan, implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur discounting. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.

D. PENDEKATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Sumber: www.spotunik.com

Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pendekatan pencapaian terhadap keberlanjutan ataupun kesinambungan berbagai aspek kehidupan yang mencakup; keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta keberlanjutan pertahanan dan keamanan.

Keberlanjutan Ekologis

Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan hal-hal sebagai berikut:

(1) Memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan di bumi tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara dan seluruh kehidupan berkelanjutan.

(2) Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan yaitu ; daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya terpulihkan. ketiga untuk melaksanakan kegiatan yang tidak

mengganggu integritas tatanan lingkungan yaitu hindarkan konversi alam dan modifikasi ekosistem, kurangi konversi lahan subur dan kelola dengan buku mutu ekologis yang tinggi, dan limbah yang dibuang tidak melampaui daya asimilatifnya lingkungan.

(3) Memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman kehidupan yang menentukan keberlanjutan proses ekologis. Proses yang menjadikan rangkaian jasa pada manusia masa kini dan masa mendatang. Terdapat tiga aspek keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman genetika, spesies, dan tatanan lingkungan. Untuk mengkonversikan keanekaragaman hayati tersebut perlu hal-hal berikut yaitu “menjaga ekosistem alam dan area yang representatif tentang kekhasan sumberdaya hayati agar tidak dimodifikasikan, memelihara seluas mungkin area ekosistem yang dimodifikasikan untuk keanekaragaman dan keberlanjutan keanekaragaman spesies, konservatif terhadap konversi lahan pertanian”.

(4) Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan hal penting untuk keberlanjutan ekosistem. Hal ini dapat dilaksanakan melalui : pencegahan pencemaran lingkungan; rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dan sumberdaya alam yang rusak; meningkatkan kapasitas produksi dari ekosistem alam dan binaan manusia.

Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan memiliki dua hal utama keduanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan aspek keberlanjutan lainnya. Keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal tersebut diatas dapat dicapai melalui kebijaksanaan makro ekonomi mencakup reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, mobilisasi tabungan domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset.

Keberlanjutan Ekonomi

Penyesuaian kebijakan yang meningkatkan keberlanjutan ekonomi makro secara

jangka pendek akan mengakibatkan distorsi sektoral yang selanjutnya mengabaikan keberlanjutan ekologis. Hal ini harus diperbaiki melalui kebijaksanaan sektoral yang spesifik dan terarah. Oleh karena itu penting mengindahkan keberlanjutan aktivitas dan ekonomi sektoral. Untuk mencapai keberlanjutan ekonomi sektoral, berbagai kasus dilakukan terhadap kegiatan ekonomi. Pertama, sumberdaya alam yang nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang tangibble dalam kerangka akunting ekonomi, kedua, secara prinsip harga sumberdaya alam harus merefleksikan biaya ekstaksi, ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatannya.

Pakar ekonomi harus mengidentifikasi dan memperlakukan sumber daya sebagai sumber yang terpulih, tidak terpulihkan, dan lingkungan hidup. Sumber yang terpulihkan seperti hutan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bila tidak memperlakukan produktivitas ekonomi sebagai fungsi yang pasif atau jasa yang mengalir; menggunakan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan, sedangkan sumber yang tidak terpulihkan mempunyai jumlah absolut dan berkurang bila dimanfaatkan. Oleh karena itu pada kondisi seperti ini konsep sustainable yeild tidak boleh diterapkan.

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks sumberdaya yang tidak dapat dipulihkan berarti: pemanfaatan secara efisien sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi masa mendatang dan diupayakan agar dapat dikembangkan substitusi dengan sumberdaya terpulihkan; membatasi dampak lingkungan pemanfaatannya sekecil mungkin, karena sumberdaya lingkungan adalah biosfer, secara menyeluruh sumberdaya ini tidak menciut akan tetapi bervariasi sesuai dengan kualitasnya.

Keberlanjutan Sosial Budaya

Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu:

(1) Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.

(2) Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Halangan terhadap keberlanjutan sosial harus dihilangkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkannya untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan pemuliharaan lahan dan

peningkatan peran wanita.

(3) Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi.

(4) Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Beberapa persyaratan dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial yaitu : prioritas harus diberikan pada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk manfaat bersama, investasi pada perkembangan sumberdaya misalnya meningkatkan status wanita, akses pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi harus berkelanjutan melalui investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras dengan distribusi aset produksi yang adil dan efektif, kesenjangan antar regional dan desa, kota, perlu dihindari melalui keputusan lokal tentang prioritas dan alokasi sumber daya.

Keberlanjutan Politik

Keberlanjutan politik diarahkan pada respek pada human right, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi dibidang ekonomi, sosial dan politik, demokrasi yang dilaksanakan perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan dan bertanggungjawab, kepastian kesedian pangan, air, dan pemukiman.

Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan.

Keberlanjutan keamanan seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara dan bangsa perlu diperhatikan.

E. KESIMPULAN

Keberlanjutan bukanlah merupakan konsep yang sederhana melainkan kompleks, karena dalam operasionalnya banyak hal yang perlu diperhatikan dan saling berkaitan. Oleh karena pemahaman pembangunan berkelanjutan penting ditingkatkan terutama bagi pengambil kebijakan baik skala makro maupun mikro guna mencapai tujuan pembangunan.

Untuk memahami konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, maka dalam

aplikasi atau penerapannya dibutuhkan landasan konsep atau teori yang dapat dijadikan acuan dalam menuju arah pembangunan, oleh karena itu pada makalah ini penulis telah mencoba mendalami dan menggambarkan berbagai konsep dan pertimbangan-pertimbangan aspek keberlanjutan guna membantu mengidentifikasi dan memformulasikan berbagai strategi, guna menjadi acuan dalam mencapai tujuan pembangunan, khusus di Indonesia.

Dalam membangun paradigma pembangunan berkelanjutan, hendaknya memperhatikan aspek berikut:

- (1) Perilaku generasi kini tidak dapat sepenuhnya menentukan perilaku generasi mendatang.
- (2) Generasi mendatang harus dipastikan memperoleh paling tidak tingkat konsumsi minimum.
- (3) Pergerakan harga sumberdaya alam dan hak kepemilikan terhadap konsumsi dimasa mendatang harus ditentukan untuk menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam masa kini.
- (4) Dalam situasi pasar tidak berfungsi, diperlukan intervensi non pasar.
- (5) Intervensi yang benar merupakan strategi yang penting untuk menjaga keberlanjutan.
- (6) Dan yang lebih penting untuk menjaga tetap terjadi keberlanjutan dalam pembangunan dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

E. STUDI KASUS



Sumber: www.balihellotravel.com

DAFTAR PUSTAKA

Djadinigrat, 2001 Untuk Generasi Masa Depan: "Pemikiran, Tantangan dan Permasalah Lingkungan", ITB. Elang Lilik, 2003 Kumpulan Makalah Perubahan Lingkungan Global dan kerjasama Internasional, IPB

Fauzi.A. 2004, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Heal,G. 1998 Valuing the Future : Economic Theory and Sustainability. Columbia. University Press.New York.

Redecon,ADB, 1990 Indonesia Economic Policies For Sustainable Development, ADB Publication. 11

Tarumingkeng. R (2004) Pengantar Falsafah Sain, Semester Ganjil 2004: Pascasarjana, IPB. Sutamihardja, 2004 Perubahan Lingkungan Global;

BAB II

KONSEP PARIWISATA BERKELANJUTAN

A. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* (Meadow et al., 1972) dalam kesimpulannya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (on sustainable basis). Meskipun mendapat kritikan yang tajam dari para ekonom karena lemahnya.



Sumber: www.news.kkp.go.id

Fundamental ekonomi yang digunakan dalam model *The Limit to Growth*, namun buku tersebut cukup menyadarkan manusia akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu perhatian terhadap aspek keberlanjutan ini mencuat kembali ketika pada tahun 1987 *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau dikenal sebagai *Brundland Commission* menerbitkan buku berjudul *Our Common Future*. Publikasi ini kemudian memicu lahirnya agenda baru mengenai konsep pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Agenda ini sekaligus menjadi tantangan konsep pembangunan ekonomi neo-klasikal yang merupakan konsep pembangunan

Konvensional yang selama ini dikenal, yang menyatakan bahwa *sustainable development is one that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own need* atau pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus di sosialisasikan ditengah masyarakat agar masyarakat maupun Negara kita dapat bersaing dan berkembang mengikuti perkembangan jaman secara globalisasi.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah sebuah upaya pembangunan suatu negara yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang serta sehingga dapat menciptakan masyarakat yang dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan hidup.

B. ASPEK YANG MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1) Aspek Ekonomi

Meliputi aspek ekonomi, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang

tanpa mengurangi kemampuan alam, masyarakat dan ekonomi untuk menaikkan kesejahteraan generasi masa depan. Jadi, jika generasi saat ini bisa maju maka



Sources: Wikipedia

Maksud dari lingkaran adalah keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan sosial digambarkan sebagai lingkaran yang saling menutupi sebagaimana dengan keberlanjutan (sustainability) sebagai keadaan di tengah-tengahnya. masyarakat bisa mencapai kesejahteraan. Sehingga kemudian terdapat alur ekonomi yang berjalan terus menerus, tanpa mengurangi tingkat kesejahteraan dari generasi ke generasi.

2) Aspek Sosial

Aspek sosial, maksudnya dipengaruhi oleh manusia sebagai pendukung komunitas dalam hal interaksi, interrelasi dan interdependensi. Hal-hal yang merupakan perhatian utama dalam aspek social adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

Aspek yang terdiri dari sosial sebagai berikut:

1. Memastikan adanya distribusi yang baik dari biaya dan keuntungan dari pembangunan disemua aspek kehidupan.
2. Menghargai dan meningkatkan perhatian terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan masyarakat dan politik, budaya ekonomi dan keamanan .

Aspek yang terdiri dari pemerintahan sebagai berikut:

Mendukung wakil rakyat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mendorong kebebasan usaha dengan memberikan insentif, kebijakan dan sistem yang mendukung □ meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan akurasi informasi □ meningkatkan akuntabilitas

3) Aspek Lingkungan

Faktor lingkungan (ekologi) yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, aspek ekologi merupakan aspek yang banyak disorot ketika membahas tentang sustainable design. Hal ini disebabkan karena aspek ini terkait langsung dengan faktor-faktor alami yang ada di bumi yang kita pijak ini. Sehingga hal-hal yang menunjukkan degradasi lingkungan jelas terlihat dan terasa.

Aspek yang terdiri dari lingkungan sebagai berikut:

1. Meminimalkan sampah dan kerusakan lingkungan
2. Meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap sumberdaya alam dan lingkungan
3. Melindungi modal alam yang kritis/penting

B. PARIWISATA BERKELANJUTAN

Pariwisata Berkelanjutan atau Sustainable Tourism adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk pertumbuhan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi – investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negative. Maka beberapa inisiatif diambil oleh sektor public untuk mengatur pertumbuhan pariwisata agar menjadi lebih baik dan menempatkan masalah akan sustainable tourism sebagai prioritas karena usaha atau bisnis yang baik dapat melindungi sumber – sumber atau asset yang penting bagi pariwisata tidak hanya untuk sekarang tetapi dimasa depan.

C. PRINSIP – PRINSIP PARIWISATA BERKELANJUTAN

Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya berkaitan dengan usaha menjamin agar sumber daya alam, sosial dan budaya yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata pada generasi ini agar dapat dinikmati untuk generasi yang akan datang. “Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang

sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat”

(Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995)

Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan isu lain yang lebih luas. Tak dapat dipungkiri, hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai „resep“ pembangunan terbaik, termasuk pembangunan pariwisata.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

1. Partisipasi

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

2. Keikutsertaan Para Pelaku/Stakeholder Involvement

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (*Lembaga Swadaya Masyarakat*), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

3. Kepemilikan Lokal

Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, dsb. seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (linkages) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

4. Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional.

5. Mewadahi Tujuan-tujuan Masyarakat

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau cultural tourism partnership dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

6. Daya Dukung

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (limits of acceptable use).

7. Monitor dan Evaluasi

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional dan lokal.

8. Akuntabilitas

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

9. Pelatihan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan.

10. Promosi

Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap, sense of place, dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut

seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

Adapun prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) terdiri dari:

- 1) Pembangunan pariwisata harus dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal , dengan ide yang melibatkan masyarakat lokal juga dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Mestinya juga melibatkan masyarakat lokal sehingga masyarakat lokal akan mempunyai rasa memiliki untuk peduli,bertanggung jawab, komitmen, meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap pelestarian lingkungan alam dan

budaya terhadap keberlanjutan pariwisata dimasa sekarang sampai untuk dimasa yang akan datang. Dan pemerintah juga harus dapat menangkap peluang dengan cara memperhatikan kualitas daya dukung lingkungan kawasan tujuan, memanfaatkan sumber daya lokal secara lestari dalam penyelenggaraan kegiatan ekowisata dan juga dapat mengelola jumlah pengunjung, sarana dan fasilitas sesuai dengan daya lingkungan daerah tujuan tersebut. Sehingga pemerintah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dengan membuka lapangan kerja.

2) Menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat. Keseimbangan tersebut akan dapat terwujud jika semua pihak dapat bekerjasama dalam satu tujuan sebagai sebuah komunitas yang solid. Komunitas yang dimaksud adalah masyarakat lokal , pemerintah lokal , industri pariwisata, dan organisasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di mana destinasi pariwisata dikembangkan. Maksudnya adalah dengan adanya atas dasar musyawarah dan permufakatan masyarakat setempat dengan adanya tersebut dapat menghasilkan dampak positif yaitu dapat membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengelolaannya, terjalinnya komunikasi yang baik antara industry pariwisata, pemerintah dan masyarakat sehingga akan terciptanya pariwisata berkelanjutan sesuai yang direncanakan.

3) Pembangunan pariwisata harus melibatkan para pemangku kepentingan, dan dengan melibatkan lebih banyak pihak akan mendapatkan input yang lebih baik. Serta harus dapat menampung pendapat organisasi masyarakat lokal, melibatkan kelompok masyarakat miskin, kaum perempuan, asosiasi pariwisata, dan kelompok lainnya dalam masyarakat yang berpotensi mempengaruhi jalannya pembangunan.

4) Memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil, dan menengah. Program pendidikan yang berhubungan dengan kepariwisataan harus mengutamakan penduduk lokal dan industri yang berkembang pada wilayah tersebut harus mampu menampung para pekerja lokal sebanyak mungkin dengan itu membuka kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha dan mengajarkan masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi dalam kegiatannya mengikuti tujuan pariwisata itu sendiri tanpa mengorbankan alam atau apapun.

5) Pariwisata harus dikondisikan untuk tujuan membangkitkan bisnis lainnya dalam masyarakat, artinya pariwisata harus memberikan dampak pengganda pada sector

lainnya, baik usaha baru maupun usaha yang telah berkembang saat ini.

6) Adanya kerjasama antara masyarakat lokal sebagai creator atraksi wisata dengan para operator penjual paket wisata, sehingga perlu dibangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara satu sama lain dengan itu menekan tingkat kebocoran pendapatan pemerintah dan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah maupun pelaku yang melakukan kegiatan itu sendiri.

7) Pembangunan pariwisata harus dapat memperhatikan perjanjian, peraturan, perundang – undangan baik tingkat nasional maupun internasional sehingga pembangunan pariwisata dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Dan juga membentuk kerjasama dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dilanggarnya peraturan yang berlaku.

8) Pembangunan pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan, memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan datang. Karena anggapan bahwa pembangunan pariwisata berpotensi merusak lingkungan adalah sesuatu yang logis, jika dihubungkan dengan peningkatan jumlah wisatawan dan degradasi daerah tujuan pariwisata tersebut.

9) Pariwisata harus bertumbuh dalam prinsip optimalisasi bukan pada eksploitasi.

10) Harus ada monitoring dan evaluasi secara periodik untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berjalan dalam konsep pembangunan berkelanjutan, dengan menggunakan prinsip pengelolaan manajemen kapasitas, baik kapasitas wilayah, kapasitas obyek wisata tertentu, kapasitas ekonomi, kapasitas sosial, dan kapasitas sumber daya yang lainnya sehingga pembangunan pariwisata dapat terus berkelanjutan.

11) Harus ada keterbukaan terhadap penggunaan sumber daya seperti penggunaan air bawah tanah, penggunaan lahan, dan penggunaan sumber daya lainnya harus dapat dipastikan tidak disalahgunakan.

12) Melakukan program peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk bidang keahlian pariwisata agar para pekerja ahli dalam bidangnya masing-masing.

13) Terwujudnya tiga kualitas, yakni pariwisata harus mampu mewujudkan kualitas hidup "quality of life" masyarakat lokal, pada sisi yang lainnya pariwisata harus mampu memberikan kualitas berusaha "quality of opportunity" kepada para penyedia jasa dalam industri pariwisata dan sisi berikutnya dan menjadi yang

terpenting adalah terciptanya kualitas pengalaman wisatawan "quality of experience".

E. STUDI KASUS

F. KESIMPULAN

Dari penjelasan tentang Sustainable Development dan sustainable tourism development beserta dengan contoh di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- (1) Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Dengan memperimbangan kriteria sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dimana secara keseluruhan Sustainable development merupakan suatu ilmu interdisipliner yang sangat kompleks dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga terjadi keharmonisan dan keserasian antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia.
- (2) Sustainable development ditopang oleh sumber daya alam, kualitas lingkungan dan manusia dari generasi ke generasi selanjutnya. Kemampuan sumber daya alam berupa kualitas dan kuantitasnya berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan terkait dengan keserasian dengan alam dan manusia.
- (3) Pembangunan berkelanjutan memperhatikan kesejahteraan generasi saat ini tanpa mengurangi kesejahteraan untuk generasi masa depan.
- (4) Pembangunan pariwisata berkelanjutan berkaitan erat dengan usaha menjamin agar sumber daya alam, sosial dan budaya yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata pada generasi ini agar dapat dinikmati untuk generasi yang akan datang.
- (5) Sustainable Tourism adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk penambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi – investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negative. Maka beberapa inisiatif diambil oleh sektor public untuk mengatur pertumbuhan pariwisata agar menjadi lebih baik dan menempatkan

masalah akan sustainable tourism sebagai prioritas karena usaha atau bisnis yang baik dapat melindungi sumber – sumber atau asset yang penting bagi pariwisata tidak hanya untuk sekarang tetapi dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

<http://madebayu.blogspot.com/2009/03/potensi-hotel-accomodation-and.html#links>

<http://rexxarsosio.wordpress.com/2008/05/13/sustainable-development-pembangunan-berkelanjutan>

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/373/jbptunikompp-gdl-dewitriwah-18614-11-%28babxi%29-i.pdf>

Modul: Sustainable tourism development

BAB III

KEBOCORAN (*LEAKAGES*) DALAM PARIWISATA

A. KEBOCORAN EKONOMI (*ECONOMIC LEAKAGES*)

Pariwisata tidak hanya dipandang sebagai penghasil devisa, tetapi sekaligus juga berfungsi sebagai instrumen untuk menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk sektor lain yang terkait pengembangan budaya daerah, pemerataan, pembangunan sekaligus sebagai instrumen untuk melestarikan lingkungan dan mendukung sumber daya manusia.



Mengukur manfaat dan kerugian pembangunan pariwisata pada beberapa negara saat ini, masih menjadi perdebatan diantara para ahli ekonomi khususnya yang telah melakukan riset dan evaluasi terhadap ekonomi pariwisata. Beberapa pandangan para pakar mewarnai pembahasan paper ini dari sudut pandangan yang berbeda-beda.

Frechtling (1987), menyatakan bahwa untuk mengukur manfaat pariwisata bagi perekonomian suatu Negara harus tersedia data yang cukup lengkap, Dia menawarkan metode alternative khususnya berhubungan dengan metode pengumpulan data tentang pengeluaran wisatawan di saat yang akan datang, dan dia juga mereview beberapa metode yang telah digunakan oleh para ahli sebelumnya, dengan menggunakan impact multipliers dan input-output analysis untuk mengukur pengeluaran sector pariwisata.

Sementara Archer dan Cooper (1994), berpendapat bahwa: penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harus menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh pakar lainnya, dan social cost- benefit analysis mestinya digunakan. Menurutnya, untuk mengukur manfaat dan dampak pariwisata tidak sekedar menghitung dampak ekonomi hanya dengan mencari multiplier efeknya saja.

Sedangkan, Sinclair dan Sutcliffe (1988), menjelaskan bahwa pengukuran multiplier income untuk sektor pariwisata pada tingkat sub nasional memerlukan pemikiran

dan data yang lebih kompleks disebabkan sering terjadinya “leakages” kebocoran sehingga analisis ini sebaiknya dilakukan pada tingkat local regional tertentu dan leakages inilah yang mestinya harus diukur dan dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan.

Dalam banyak hal, pariwisata telah terbukti berpengaruh positif terhadap perekonomian sebuah Negara yang didapatkan dari pendapatan nilai tukar valuta asing, penerimaan devisa akibat adanya konsumsi wisatawan, penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur pariwisata yang turut dinikmati oleh masyarakat local, dan di beberapa destinasi pariwisata juga sebagai generator pemberdayaan perekonomian masyarakat local. WTO memprediksi bahwa pendapatan pariwisata disumbangkan 100% secara langsung dari pengeluaran wisatawan pada suatu kawasan dan dalam kenyataannya, masyarakat lokal lebih banyak berebut lahan penghidupan dari sektor informal ini, artinya jika sektor informal bertumbuh maka masyarakat lokal akan mendapat manfaat ekonomi yang lebih besar. Sebagai contoh, peran pariwisata bagi Provinsi Bali terhadap perekonomian daerah “PDRB” sangat besar bahkan telah mengungguli sektor pertanian yang pada tahun-tahun sebelumnya memegang peranan penting di Bali.

Pada sisi lainnya, pembangunan pariwisata juga dapat berdampak negatif terhadap sebuah negara atau destinasi jika pembangunan tersebut tidak dikordinasi dan direncanakan dengan baik, artinya pembangunan pariwisata harusnya diarahkan untuk memperdayakan masyarakat dalam negeri dengan sistem yang terkait langsung dengan faktor-faktor produksi dalam negeri. Penggunaan factor-faktor produksi dalam negeri seperti tanah, air, dan semua aspek yang terkait dengan lingkungan fisik dan sosial dapat dilakukan secara bijaksana.

Economic leakages dianggap sebagai masalah yang paling sulit untuk diatasi karena sektor pariwisata akan bertumbuh pada iklim liberalisasi yang memungkinkan pihak asing dapat melakukan bisnis pada pasar domestik sehingga terjadinya economic leakages tidak dapat dihindari. Economic leakages dapat bersifat external, internal, dan invisible leakages, dimana ketiga jenis leakages

tersebut disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Leakages tidak dapat dihindari pada kondisi pasar bebas atau liberalisasi perdagangan saat ini, walau demikian economic leakages dapat diminimalkan dengan berbagai cara dan strategi. Strategi yang terbaik adalah dengan strategi struktur clusture yang harusnya dapat diterapkan oleh pemerintah melalui kesepakatan internasional baik yang dilakukan pada level export, level supplier, maupun level input ekonomi yang dapat diatur sedemikian rupa untuk mengurangi atau meminimalkan terjadinya economic

leakages.

B. PENGARUH NEGATIF PEMBANGUNAN PARIWISATA

Pembangunan sektor pariwisata diberbagai belahan dunia ini telah berdampak pada berbagai dimensi kehidupan manusia, tidak hanya berdampak pada dimensi sosial ekonomi semata, tetapi juga menyetuh dimensi sosial budaya bahkan lingkungan fisik. Dampak terhadap berbagai dimensi tersebut bukan hanya bersifat positif tetapi juga berdampak negatif.

Menurut Spillane (hal 33, 1994), dampak positif pariwisata terhadap pembangunan ekonomi antara lain; dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, sumber devisa negara dan distribusi pembangunan secara spritual. Sedangkan dampak negatif pariwisata terhadap pembangunan ekonomi antara lain; vulnerability ekonomi, kebocoran pendapatan, polarisasi spasial, sifat pekerjaan yang musiman, dan terhadap alokasi sumber daya ekonomi. Terhadap lingkungan fisik Spillane (1996) berpendapat bahwa pariwisata dapat menimbulkan problemproblem besar seperti polusi air dan udara, kekurangan air, keramaian lalu lintas dan kerusakan dari pemandangan alam tradisional.

Beberapa pengaruh negatif dari pembangunan pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kebobolan (Enclave Tourism)

“Enclave tourism” sering diasosiasikan bahwa sebuah destinasi wisata dianggap hanya sebagai tempat persinggahan sebagai contohnya, sebuah perjalanan wisata dari manajemen kapal pesiar dimana mereka hanya singgah pada sebuah destinasi tanpa melewati malam atau menginap di hotel-hotel yang telah disediakan industri lokal sebagai akibatnya dalam kedatangan wisatawan kapal pesiar tersebut manfaatnya dianggap sangat rendah atau bahkan tidak memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sebuah destinasi yang dikunjunginya.

Kenyataan lain yang menyebabkan “enclave” adalah kedatangan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata yang dikelola oleh biro perjalanan wisata asing dari “origin country” sebagai contohnya, mereka menggunakan maskapai penerbangan milik perusahaan mereka sendiri, kemudian mereka menginap di sebuah hotel yang di miliki oleh manajemen chain dari negara mereka sendiri, berwisata dengan armada dari perusahaan chain milik pengusaha mereka sendiri, dan

dipramuwisatakan oleh pramuwisata dari negerinya sendiri, dan sebagai akibatnya masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.

b. Pembiayaan Infrastruktur (Infrastructure Cost)

Tanpa disadari ternyata pembangunan sektor pariwisata yang berstandar internasional dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah dan akibatnya cenderung akan dibebankan pada sektor pajak dalam artian untuk membangun infratraktur tersebut, pendapatan sektor pajak harus ditingkatkan artinya pngutan pajak terhadap masyarakat harus dinaikkan.

Pembangunan pariwisata juga mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas bandara, jalan raya, dan infrastruktur pendukungnya, dan tentunya semua hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sangat dimungkinkan pemerintah akan melakukan re-alokasi pada anggaran sektor lainnya seperti misalnya pengurangan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan.

Kenyataan di atas menguatkan pendapat Harris dan Harris (1994) yang mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata harusnya menyertakan faktor standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata yang sering dilupakan pada analisis dampak pariwisata.

c. Peningkatan Harga (Inflation)

Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan

menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun “inflasi” yang pastinya akan berdampak negative bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional artinya jikalau pendapatan masyarakat lokal meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga akan menyebabkan daya beli masyarakat lokal menjadi rendah.

Pembangunan pariwisata juga berhubungan dengan meningkatnya harga sewa rumah, harga tanah, dan harga-harga property lainnya sehingga sangat dimungkinkan masyarakat lokal tidak mampu membeli dan cenderung akan tergusur ke daerah pinggiran yang harganya masih dapat dijangkau.

Sebagai konsukuensi logis, pembangunan pariwisata juga berdampak pada meningkatnya harga-harga barang konsumtif, biaya pendidikan, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya sehingga pemenuhan akan kebutuhan pokok justru akan menjadi sulit bagi penduduk lokal. Hal ini juga sering dilupakan dalam setiap

pengukuran manfaat pariwisata terhadap perekonomian pada sebuah Negara.

d. Ketergantungan Ekonomi (Economic Dependence)

Keanekaragaman industri dalam sebuah perekonomian menunjukkan sehatnya sebuah negara, jika ada sebuah negara yang hanya menggantungkan perekonomiannya pada salah satu sektor tertentu seperti pariwisata misalnya, akan menjadikan sebuah negara menjadi tergantung pada sektor pariwisata sebagai akibatnya ketahanan ekonomi menjadi sangat beresiko tinggi.

Di beberapa negara, khususnya negara berkembang yang memiliki sumber daya yang terbatas memang sudah sepantasnya mengembangkan pariwisata yang dianggap tidak memerlukan sumber daya yang besar namun pada negara yang memiliki sumber daya yang beranekaragam harusnya dapat juga mengembangkan sektor lainnya secara proporsional.

Ketika sektor pariwisata dianggap sebagai anak emas, dan sektor lainnya dianggap sebagai anak diri, maka menurut Archer dan Cooper (1994), penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harusnya menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh pakar lainnya. Ketergantungan pada sebuah sektor, dan ketergantungan pada kedatangan orang asing dapat diasosiasikan hilangnya sebuah kemerdekaan sosial dan pada tingkat nasional, sangat dimungkinkan sebuah negara akan kehilangan kemandirian dan sangat tergantung pada sektor pariwisata.

e. Masalah Musiman (Seasonal Characteristic)

Dalam Industri pariwisata, dikenal adanya musim-musim tertentu, seperti misalnya musim ramai "high season" dimana kedatangan wisatawan akan mengalami puncaknya, tingkat hunian kamar akan mendekati tingkat hunian kamar maksimal dan kondisi ini akan berdampak meningkatnya pendapatan bisnis pariwisata. Sementara dikenal juga musim sepi "low season" di mana kondisi ini rata - rata tingkat hunian kamar tidak sesuai dengan harapan para pebisnis sebagai dampaknya pendapatan industri pariwisata juga menurun hal ini yang sering disebut "problem seasonal".

Sementara ada kenyataan lain yang dihadapi oleh para pekerja, khususnya para pekerja informal seperti supir taksi, para pemijat tradisional, para pedagang acung, mereka semua sangat tergantung pada kedatangan wisatawan, pada kondisi low

season sangat dimungkinkan mereka tidak memiliki lahan pekerjaan yang pasti. Kenyataan di atas, menguatkan pendapat West (1993) yang menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu, kebermanfaatan pariwisata terhadap ekonomi harusnya berlaku proporsional untuk semua musim, baik musim sepi maupun musim ramai wisatawan.

f. Kebocoran Pariwisata (Leakage in Tourism)

Leakage atau kebocoran dalam pembangunan pariwisata dapat diakibatkan dari adanya kebocoran yaitu kebocoran import dan kebocoran export. Biasanya kebocoran import terjadi ketika terjadinya permintaan terhadap peralatan-peralatan yang berstandar internasional yang digunakan dalam industri pariwisata, bahan makanan dan minuman import yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat lokal atau dalam negeri. Besarnya pendapatan dari sektor pariwisata juga diiringi oleh besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan import terhadap produk yang dianggap berstandar internasional. Sedangkan kebocoran export seringkali terjadi pada pembangunan destinasi wisata khususnya pada negara miskin atau berkembang yang cenderung memerlukan modal dan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wisata lainnya.

Kondisi seperti ini, akan mengundang masuknya penanam modal asing yang memiliki modal yang kuat untuk membangun resort atau hotel serta fasilitas dan infrastruktur pariwisata, sebagai imbalannya, keuntungan usaha dan investasi mereka akan mendorong uang mereka kembali ke negara mereka tanpa bisa dihalangi, hal inilah yang disebut dengan "leakage" kebocoran export.

Hal ini membenarkan pendapat dari Sinclair dan Sutcliffe (1988), yang menjelaskan bahwa pengukuran manfaat ekonomi dari sektor pariwisata pada tingkat sub nasional harunya menggunakan pemikiran dan data yang lebih kompleks untuk menghindari terjadinya "leakages" kebocoran. Khusus masalah leakages pada paper ini akan dibahas pada sub - bab khusus yakni economic leakages dan strategi meminimalkan economic leakages.

C. JENIS-JENIS KEBOCORAN

External Leakage

Leakage ini terjadi akibat pengeluaran pada sector pariwisata yang terjadi di luar

destinasi dimana pengeluaran tersebut berhubungan dengan industri lokal. External leakages dapat terjadi disebabkan oleh, (1) investor asing membangun infrastruktur dan fasilitas pariwisata pada negara sedang berkembang, sehingga profit dan pembayaran terjadi di luar negeri. (2) Arus uang bisnis pariwisata langsung terjadi di luar negeri dikarenakan booking bisa dilakukan di luar negeri atau terjadi secara online, wisatawan datang dengan maskapai penerbangan asing, cruise ship atau kapal pesiar, atau bentuk usaha lain yang dimiliki oleh orang asing.

Luasnya dan dampak dari external leakages sangat bervariasi pada setiap negara dan juga berbeda pada setiap destinasi pariwisata. Untuk external leakage yang berhubungan dengan penanaman modal asing dalam pembangunan fasilitas pariwisata, leakages ini akan berpengaruh dalam waktu pendek dan bahkan waktu panjang tergantung seberapa besar modal yang ditanamkannya dan lamanya kontrak kerjasamanya. Karena keterbatasan pembiayaan dalam negeri, leakages tidak dapat dihindari khususnya pada pembangunan negara-negara yang sedang berkembang, sementara pada negara maju, leakages dapat diminimalkan karena kondisi keuangan negara maju relatif lebih baik.

Pada kasus leakages yang disebabkan oleh pemesanan perjalanan secara langsung dari negara asing (*foreign booking intermediaries*), dapat dihindari dengan menyediakan fasilitas didalam negeri yang dapat diakses dari luar negeri, mungkin dengan cara online dan cara lainnya yang memungkinkan transaksi wisatawan dapat diterima secara langsung oleh negara atau perusahaan dalam negeri.

Internal Leakage

Rata-rata internal leakages pada kebanyakan negara sedang berkembang berada pada kisaran 40 sampai dengan 50% dari total penerimaan kotor sektor pariwisata pada skala ekonomi yang lebih kecil. Sementara dalam skala ekonomi yang lebih luas, internal leakage terjadi antara kisaran 10 sampai dengan 20% (UNEP). Internal leakages dominan disebabkan oleh penggunaan komponen import yang diukur secara domestik. Menurut (UNEP) leakage internal dapat diukur dengan *Tourism Satellite Accounts* (TSA) dan hal ini telah dilakukan oleh 44 negara yang memiliki database update tentang kepariwisataannya (WTO). Internal leakages pada negara berkembang terjadi pada rantai penyediaan suplies (*goods and Services*) pariwisata yang diimport.

Internal leakages pada beberapa destinasi biasanya terjadi akibat permintaan atau

tuntutan tingkat kualitas terhadap pelayanan pariwisata dan hiburan pariwisata khususnya terkait dengan produk - produk import. Produk-produk yang dimaksud misalnya pengadaan wine dan beberapa minuman beralkohol yang bermerek internasional yang diproduksi di luar negeri. Hotel-hotel chain dengan standar internasionalnya juga menyebabkan internal leakages yang cukup berarti karena mereka cenderung akan menuruti standar yang telah ditentukan dan diharapkan oleh wisatawan.

Invisible Leakage

Invisible leakages adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pariwisata yang terjadi secara nyata namun sangat sulit untuk didokumentasi secara nyata tetapi akan berpengaruh secara kumulatif. Aktivitas yang dapat menyebabkan invisible leakages misalnya: pajak, informal transaksi yang biasanya tidak tercatat, serta tabungan dan investasi off - shore.

Leakages ini akan dapat dikurangi dengan tindakan melihat cluster pariwisata, menerapkan kebijakan pajak pada semua cluster pariwisata, membuat kebijakan keuangan dan fiskal, dan membuat perjanjian kerjasama dengan negara lain yang berhubungan dengan kerjasama pariwisata sebagai investor maupun pemasok wisatawan.

Invisible leakage yang lainnya dapat berbentuk penggunaan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, kerusakan lingkungan, degradasi budaya, hilangnya sejarah, dan rusaknya aset - aset pariwisata dalam waktu lama sehingga dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal.

D. FAKTOR MENINGKATNYA KEBOCORAN

Terdapat banyak faktor menyebabkan tingginya leakages, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Negara kepulauan kecil cenderung berada pada skala ekonomi yang kecil dan memiliki ketergantungan import yang tinggi karena tidak memiliki kapasitas produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh sektor pariwisata. Sementara pada negara kepulauan yang lebih besar tidak menghadapi persoalan kapasitas produksi karena telah terbangun hubungan antar sektor pariwisata dan pendukung pariwisata dalam skala ekonomi domestik.
- (2) Keterbatasan Infrastruktur pada negara sedang berkembang dapat

menyebabkan tingginya leakages, berbeda dengan negara yang telah membangun infrastruktur pariwisata, dapat meningkatkan kemungkinan produksi industri

domestik, dan dapat membangun hubungan yang lebih kuat antar industri dalam negeri, sehingga diharapkan dapat menciptakan efisiensi distribusi barang dan jasa dalam negeri, dan dapat menghalangi masuknya perusahaan asing ke dalam negeri (Karagiannis 2004).

- (3) Meningkatnya angka kunjungan wisata ke Karibia pada sepuluh tahun terakhir menyebabkan meningkatnya permintaan barang dan jasa untuk keperluan sektor pariwisata. Dan akhirnya sumberdaya domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan sektor pariwisata, dan sektor pendukung pariwisata seperti pertanian di Karibia tidak efisien bahkan justru berbiaya tinggi atau un - efisien dan import dianggap menjadi alternatif yang lebih baik (Karagiannis, 2004).

D. STRATEGI PENGANGGULANGAN

Strategi untuk meminimalkan economic leakage pada sektor pariwisata harusnya menjadi strategi pemerintah dengan cara memperhatikan semua cluster industri yang berhubungan dengan struktur perekonomian regional.

Strategi Cluster dilakukan dengan memberikan peran kepada pemerintah baik secara nasional maupun provinsi secara fleksibel untuk memainkan perannya dalam pembangunan pariwisata. Fleksibilitas pemerintah dapat menciptakan kreativitas dan keberlanjutan pembangunan dan pemasaran pariwisata, di saat yang sama pemerintah juga harus mampu menciptakan pilihan untuk melakukan intervensi yang dapat diterima oleh semua stakeholder pariwisata untuk berkreasi dan menciptakan aturan dunia usaha yang kondusif pada sektor pariwisata. Campur tangan pemerintah diperlukan pada semua level struktur cluster yang terbagi menjadi tiga level sebagai berikut:

- (1) Export level, campur tangan pemerintah pada level ini didasarkan pada kenyataan bahwa pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata memiliki persamaan input seperti kebutuhan tenaga kerja, teknologi, pendanaan, infrastruktur pada sebuah struktur yang harus diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan terjadinya leakages.
- (2) Regional Supplier level, campur tangan pemerintah juga diperlukan untuk

memfasilitasi provider asing, dimana provider asing diperlukan untuk menyediakan komponen yang tidak mampu disediakan oleh provider domestik, kebutuhan barang dan jasa inilah yang menarik masuknya supplier asing ke regional dengan tingkat leakages yang sekecil mungkin.

- (3) Economic Input Level, campur tangan pemerintah pada level ini diperlukan bagi semua pihak untuk menyediakan landasan bisnis. Organisasi swasta dan pemerintah atau agen yang lainnya memerlukan landasan untuk menjalankan bisnisnya sehingga diperlukan dukungan pendidikan dan pelatihan, inovasi, pendanaan, infrastruktur dan informasi, iklim usaha seperti pajak, aturan dan administrasi, dan jaminan kualitas hidup.

Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa penanaman modal asing (finance) pada sektor pariwisata dan kerjasama antara perusahaan-perusahaan domestik dan asing harus dilakukan dalam hubungan regional, dan dilakukan secara selektif untuk pembangunan yang bersifat keharusan seperti (1) Modernisasi yang dilakukan secara komprehensif pada sistem yang transparan khususnya yang berkaitan dengan design dan engineering, equipment dan supplies (2) Menghindari adanya peluang terjadinya tindak korupsi pada contract manufacturing. (3) Melakukan regulasi pembatasan dan rasionalisasi. (4) Melakukan legal protection khususnya untuk rekanan perusahaan pariwisata asing pada marketing dan distribusi dan logistik. Keempat poin di atas dapat dilakukan pada framework kerjasama GATS dan dapat diterapkan pada keempat cluster segment pada gambar di atas. Pemerintah juga dapat meminimalkan terjadinya external leakages dengan cara membuat model kontrak kerjasama bagi perusahaan pariwisata dengan investor asing dan supplier dengan perjanjian atau kesepakatan internasional yang berpihak pada sektor pariwisata regional atau domestik.

Pemerintah harus juga dapat menyediakan sistem yang mendorong pemberdayaan tenaga kerja lokal (human resources system), sehingga mendorong adanya inovasi pada industri pariwisata (innovations system), pemerintah juga harus dapat menjamin keberlanjutan pemasaran destinasi (capital markets system), pembangunan infrastruktur fisik yang baik dapat menciptakan efisiensi distribusi barang dan jasa dalam negeri, pemerintah juga diharapkan dapat

menjamin iklim bisnis yang kondusif dengan menjamin adanya stabilitas politik dan keamanan yang terjamin, dan pada akhirnya pembangunan pariwisata harusnya dapat menciptakan terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik bagi semua stakeholder pariwisata (host – wisatawan – investor – pemerintah)

D. STUDI KASUS

F. KESIMPULAN

Pengaruh positif pembangunan pariwisata sudah tidak perlu diragukan lagi seperti pendapatan nilai tukar valuta asing, penerimaan devisa akibat adanya konsumsi wisatawan, penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur pariwisata yang turut dinikmati oleh masyarakat local, dan di beberapa destinasi pariwisata juga sebagai generator pemberdayaan perekonomian masyarakat local.

Selain pengaruh positif tersebut, pariwisata juga dapat menimbulkan pengaruh negatif seperti economic leakages, enclave, inflasi, tingginya pembiayaan infrastruktur dan fasilitas, ketergantungan sektoral, dan masalah musiman. Dari sekian banyak masalah negatif yang dapat ditimbulkan oleh sektor pariwisata, economic leakages dianggap masalah yang paling sulit untuk diatasi karena sektor pariwisata akan bertumbuh pada iklim liberalisasi yang memungkinkan pihak asing dapat melakukan bisnis pada pasar domestik sehingga terjadinya economic leakages tidak dapat dihindari. Economic leakages dapat bersifat external, internal, dan invisible leakages, dimana ketiga jenis leakages tersebut disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda.

Leakages tidak dapat dihindari pada kondisi pasar bebas atau liberalisasi perdagangan saat ini, walau demikian economic leakages dapat diminimalkan dengan berbagai cara dan strategi. Strategi yang terbaik adalah dengan strategi struktur clusture yang harusnya dapat diterapkan oleh pemerintah melalui kesepakatan internasional baik yang dilakukan pada level export, level supplier, maupun level input ekonomi yang dapat diatur sedemikian rupa untuk mengurangi atau meminimalkan terjadinya economic leakages.

G. DAFTAR PUSTAKA

Bjorn Hettne, 2001, Teori Pembangunan Dan Tiga Dunia, Penerbit Gramedia Pusaka Utama, Jakarta

H. Kodhyat, 1996, Sejarah Pariwisata Dan Perkembangannya Di Indonesia, Penerbit Grasindo, Jakarta

Pitana, I Gde, 2005, Sosiologi Pariwisata, Penerbit Andi, Yogyakarta Gollub, James,

Hosier, Amy and Woo, Grace. (2000). "Using Cluster - Based Economic Strategy to Minimise Tourism Leakages", ICF Consulting, San Francisco, California.

Archer, B. and Cooper, C. (1994) "The Positive and Negative Impacts of Tourism". Pp. 73 - 91 in W.F. Theobald (ed.) Global Tourism: The Next Decade, Butterworth - Heinemann, Oxford.

Archer, B.H. (1982) "The Value of Multipliers and the Policy Implications", Tourism

BAB IV MASS TOURISM VS SUSTAINABLE TOURISM

a. Tantangan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan



Pariwisata secara umum bisa dijabarkan sebagai dua kotak besar. Kotak besar pertama yaitu pariwisata massal yang selama ini dilihat dan berkembang. Wisatawan didatangkan sebanyak-banyaknya ke suatu daerah. Semua sumber daya alam dan budaya dikomersialisasikan besar-besaran tanpa memperhatikan kelestariannya.

Nilai edukasi tidak diperhatikan baik bagi wisatawan sebagai tamu (*guest*) maupun penyedia sebagai tuan rumah (*host*). Pariwisata masal ini kemudian terbukti membawa banyak dampak negatif dibandingkan dampak positifnya baik bagi masyarakat lokal, kelestarian alam dan budaya, hingga bagi ekonomi masyarakat lokal.

Kotak besar kedua yang beberapa tahun terakhir ini baru berkembang cukup pesat adalah pariwisata alternatif. Berkembangnya pariwisata alternatif ini merupakan reaksi dari munculnya dampak negatif pariwisata masal. Sehingga keberadaan pariwisata alternatif ini cenderung lebih memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal baik dari segi budaya, ekonomi dan edukasi, hingga meminimalisir dampak negatif perkembangan pariwisata. Selain itu pariwisata alternatif juga memberikan nilai edukasi bagi wisatawan yang datang ke suatu destinasi wisata.

Kemudian, hasil-hasil studi yang berkembang menunjukkan bahwa pariwisata harus memiliki konsep keberlanjutan. Maksudnya pariwisata tidak hanya berhenti pada satu titik, tapi terus menerus berputar, meregenerasikan dirinya, dan semakin berkembang lebih baik. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mementingkan kepentingan generasi saat ini tanpa melupakan kepentingan generasi masa depan. Maksudnya generasi masa kini dan generasi masa depan kebutuhannya harus sama-sama terpenuhi. Kondisi alam harus sama-sama lestari, eksistensi budaya lokal harus sama lestari, serta edukasi bagi masyarakat lokal dalam interaksinya dengan tamu juga harus sama pentingnya untuk dilestarikan.

Pariwisata berkelanjutan melibatkan masyarakat sebagai salah satu pelaku utamanya dan mengutamakan kelestarian sumber daya. Hal ini kemudian dikenal dengan konsep *sustainable tourism* (Indonesia: pariwisata berkelanjutan). Payung besar pariwisata berkelanjutan ini kemudian berelasi dan membawahi kotak besar pariwisata alternatif yang kemudian terwujud dalam beberapa konsep. Konsep-konsep pengembangan pariwisata alternatif dalam wujud ekowisata (*ecotourism*) yang menitikberatkan pada kelestarian ekosistem dan berbasis masyarakat lokal sebagai aktor utama, dimana kegiatan pariwisatanya merupakan kegiatan yang bertanggung jawab (*responsible tourism*).

Kesalahan pola pikir dan prinsip pengelolaan pariwisata yang masih perlu dibenahi saat ini adalah: Berapa banyak wisatawan yang bisa ditarik ke suatu daerah tujuan wisata (destinasi)? serta Pelayanan dan fasilitas apa yang wisatawan inginkan? Membicarakan kedua hal penting ini tentu akan berkaitan dengan banyak hal. Saat membicarakan berapa banyak wisatawan yang bisa ditarik untuk datang ke suatu daerah tujuan wisata, tentu kita juga turut membicarakan sisi

perekonomian daerah. Pariwisata yang dianggap dapat memberikan kontribusi besar atas pemasukan daerah tentu dalam pengelolaan daerah tujuan wisata yang diutamakan adalah menarik jumlah wisatawan sebanyak mungkin. Banyak wisatawan yang datang, maka pemasukan semakin tinggi.

Namun kesalahan fatal yang sering kali terabaikan atau sengaja tidak diperhatikan adalah kapasitas penerimaan wisatawan di suatu daerah. Berapa maksimal daerah tujuan wisata tersebut bisa menampung kunjungan wisatawan dalam periode tertentu. Sebab hal ini akan berdampak pada kelestarian sumber daya di daerah yang dijadikan daya tarik wisata.

Kemudian yang sering terabaikan adalah bagaimana target pasar yang tepat untuk daerah tujuan wisata tersebut. Tidak semua wisatawan yang dapat berkunjung ke suatu destinasi wisata dapat dikatakan wisatawan yang potensial dan berkualitas. Dalam hal ini maksudnya adalah wisatawan yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat lokal yang mampu dan mau mengeluarkan uangnya di destinasi wisata.

Apabila kedua hal tersebut sudah dirancang dengan tepat baik dari jumlah kapasitas kunjungan wisatawan terkait daya tampung daerah dalam periode tertentu serta target pasar terkait wisatawan yang berkualitas dan potensial, maka hal lain yang harus diperbaiki adalah terkait penyediaan pelayanan dan fasilitas wisata. Pariwisata sebagai salah satu industri jasa besar atau yang dikenal dengan industri jasa keramahtamahan (*hospitality industry*) terkait erat dengan pelayanan dan penyediaan fasilitas. Keramahtamahan yang diutamakan sebagai jasa yang dijual harus mengutamakan service atau pelayanan yang profesional. Baik dalam taraf sederhana pun pemberian layanan jasa harus tetap profesional dan sesuai etika yang baik. Bukan pelayanan yang seadanya tanpa memperhatikan etika pelayanan jasa. Karena wisatawan yang berkunjung menginginkan pengalaman yang berbeda dari tempat asalnya. Itu yang harus diperhatikan dalam pelayanan. Misalnya bagaimana cara memberikan salam yang baik dan menggambarkan citra warga lokal yang berbudaya positif.

b. Kritik terhadap Mass Tourism

Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi perubahan pandangan atas dampak pengembangan kepariwisataan bagi negara yang bersangkutan, pariwisata massal dipandang sebagai memiliki peluang menimbulkan degradasi bahkan destruksi atas lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan budaya dan sosial, di samping dampak positif pada kehidupan ekonomi negara dan bangsa yang dikunjungi.

Sebagai upaya meredam dampak negatif itu, berbagai negara berupaya mengembangkan pariwisata berkualitas, dalam arti menyelenggarakan kepariwisataannya dengan menawarkan perjalanan wisata eksklusif, alternatif dan

sebangsanya yang tidak bersifat massal.

Berbagai negara di dunia kemudian berupaya mengubah arah pengembangan kepariwisataannya dari *mass tourism* ke arah “Pariwisata Berkualitas” (*quality tourism*), di mana *quality tourism* diyakini bisa lebih bermanfaat tidak saja bagi kehidupan ekonomi negara dan bangsa, namun juga bermanfaat dalam hal kemajuan masyarakat secara utuh dan sinambung, berkelanjutan untuk masa yang sangat panjang (*sustainable*), atau bahkan tak terbatas waktu, baik dalam hal kesejahteraan ekonomi, maupun kehidupan sosial budayanya. Keterlambatan mengubah arah dari *mass tourism* ke *quality tourism* akan semakin sukar dilakukan, mengingat kondisi dan situasinya yang dihadapkan pada persaingan yang datang dari destinasi wisata murah dan asri di satu sisi dengan destinasi di sisi lain yang merupakan peninggalan pengembangan berlebihan selama puluhan tahun sebelumnya.

c. Pariwisata Alternatif: pariwisata skala kecil

Pariwisata alternatif merupakan suatu bentuk kegiatan kepariwisataan yang tidak merusak lingkungan, berpihak pada ekologis dan menghindari dampak negatif dari pembangunan pariwisata berskala besar yang dijalankan pada suatu area yang tidak terlalu cepat pembangunannya. (Koslowskidan Travis: 1985). Merujuk dari pengertian menurut ahli tersebut, maka pariwisata alternatif adalah pariwisata yang muncul guna meminimalisir dampak negatif dari perkembangan pariwisata masal yang terjadi hingga saat ini. Dampak negatif dari pariwisata masal atau pariwisata berskala besar adalah ancaman terhadap kelestarian budaya dimana budaya lebih dikomersialisasikan dibandingkan dijaga keaslian dan kelestariannya. Selain itu dampak negatif yang dapat berbahaya adalah perusakan sumber daya alam dimana sumber daya alam habis dieksploitasi besar-besaran.

Selain itu pariwisata alternatif adalah kegiatan kepariwisataan yang memiliki gagasan yang mengandung arti sebagai suatu pembangunan yang berskala kecil atau juga sebagai suatu kegiatan kepariwisataan yang disuguhkan kepada wisatawan, dimana segala aktivitasnya turut melibatkan masyarakat. (Saglio: 1979 dan Gonsalves: 1984). Jadi, bisa disimpulkan pembangunan pariwisata yang baik dan mendukung kelestarian sumber daya baik alam, budaya dan manusia adalah pariwisata alternatif.

d. Studi Kasus

e. Kesimpulan

f. Daftar Pustaka

BAB V Perubahan Iklim

a. Trend Perubahan Iklim

Industri pariwisata sangat tergantung pada keunikan sumber daya alam dan lingkungan. Perubahan iklim yang tidak menentu dan bencana alam yang mengiringinya akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang bisa mempengaruhi sektor pariwisata. Sebuah destinasi yang mengandalkan keunikan sumber daya alam akan mengalami penurunan daya saing jika destinasi tersebut mengalami kerusakan, sehingga tidak menarik lagi bagi wisatawan. Faktor cuaca dan iklim seperti cuaca cerah, banyak cahaya matahari, kecepatan angin, udara sejuk, kering, panas dan sebagainya sangat mempengaruhi pelaksanaan pariwisata, baik darat maupun laut. Wisatawan akan merasa tidak nyaman jika sebuah destinasi yang awalnya berhawa dingin dan sejuk ternyata akibat adanya kerusakan lingkungan destinasi tersebut menjadi berhawa panas. Transportasi juga akan terganggu akibat perubahan cuaca yang tidak menentu terutama transportasi udara.

Saat ini dampak perubahan iklim terhadap industri pariwisata di Indonesia memang belum memberikan dampak buruk yang signifikan, tetapi berangsur-angsur efeknya sesungguhnya perubahan iklim telah memberikan ancaman yang luar biasa terhadap keberlangsungan industri pariwisata. Secara umum Julian Fischer membagi empat hal yang mungkin akan dihadapi oleh para pelaku dalam industri pariwisata akibat dari perubahan iklim. Dampak pertama adalah *framework* yang berkaitan dengan ketahanan sosial, pembangunan ekonomi, dan kebijakan mitigasi oleh pemerintah. Kemudian dalam hal perilaku dan kebutuhan wisatawan, dampak tersebut berkaitan dengan kesadaran masyarakat, pengetahuan, sikap, perilaku, motivasi, dan opini akan perubahan iklim dan bagaimana mereka ikut berpartisipasi di dalamnya. Dalam hal pengalaman berwisata dan daya tarik destinasi dampak perubahan iklim berkaitan dengan sumber daya alam, keaneragaman hayati, aktivitas wisata, kesehatan, dan kenyamanan berwisata. Sementara dalam hal infrastruktur dan industri, dampak akan berkaitan langsung dengan investasi, proteksi, dan aktivitas bisnis di daerah destinasi. Dampak-dampak tersebut akan bisa mengubah kondisi fisik sebuah destinasi, mengubah pola perjalanan wisatawan, penurunan daya saing produk wisata, dan jumlah kunjungan wisatawan serta peningkatan harga produk pariwisata yang tidak terkontrol.

Berikut adalah beberapa dampak yang sudah terjadi dan ancaman yang akan dihadapi oleh industri dan sektor pariwisata di Indonesia akibat dari perubahan

iklim dan pemanasan global:

Kenaikan permukaan air laut menyebabkan kerusakan pada ekosistem mangrove yang akan menghilangkan daya tarik wisata hutan mangrove di beberapa kawasan pesisir dan pantai di Indonesia. Kerusakan mangrove juga telah menyebabkan abrasi pantai, sehingga sejumlah pantai di Indonesia menjadi tidak menarik. Di Bali kerusakan pantai akibat abrasi diperkirakan 3,7 km per tahun dengan erosi ke daratan sepanjang 50 sampai 100 meter.

Saat ini setiap tahun terjadi kenaikan permukaan air laut sebesar 0,30 meter akibat mencairnya es di kutub utara karena pemanasan global. Beberapa pantai dan pulau di Indonesia yang merupakan destinasi wisata unggulan, seperti pantai Kuta, Sanur, dan kepulauan Wakatobi pada tahun 2030 akan tergenang dan tenggelam, sehingga dipastikan kehilangan keindahannya.

Kenaikan permukaan air laut juga akan mengancam daerah dan masyarakat pesisir. Sebagai contoh kondisi air di Teluk Jakarta naik 57 mm tiap tahun. Pada 2050, diperkirakan 160 km² dari Jakarta akan terendam air, termasuk Bandara Soekarno-Hatta dan Ancol sebagai salah satu penunjang dan destinasi wisata utama di Indonesia.

Peningkatan suhu air laut akan menyebabkan pemutihan terumbu karang yang otomatis menghilangkan keindahannya. Hal ini sudah terjadi di beberapa taman laut di Indonesia. Kenaikan suhu sebesar dua derajat akan menyebabkan terumbu karang mati. Padahal sejak tahun 1990 telah terjadi kenaikan suhu sebesar 0,30 derajat celsius setiap tahunnya. Bisa diperkirakan jika kenaikan suhu tidak bisa di kontrol, maka dalam beberapa tahun ke depan taman-taman bawah laut di Indonesia, seperti Bunaken, Derawan, dan Raja Ampat terancam rusak dan tidak menarik lagi karena terumbu karang mengalami pemutihan, bahkan mati.

Peningkatan suhu udara yang ekstrim akan menyebabkan punahnya beberapa makhluk hidup, sehingga mempengaruhi jumlah keanekaragaman hayati di beberapa taman nasional di Indonesia.

Saat ini Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati terbesar nomor tiga di dunia setelah Brazil dan Zaire. Ini merupakan aset utama bagi Indonesia untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. Sebagian wilayah yang menjadi dengan atraksi alam yang unik telah mulai kehilangan pesonanya karena kerusakan dan kepunahan. Perlu diingat juga bahwa setiap kedatangan atau pergerakan wisatawan pula memberikan kontribusi terhadap efek gas rumah kaca dan karbon (*carbon foot print*) terhadap konsumsinya, lalu bagaimana dengan keberlangsungan industri pariwisata seandainya kita terus mengelak untuk tidak segera menerapkan

pariwisata berbasis lingkungan hidup (ramah lingkungan) demi terjaganya *sustainability* secara ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi?

b. Upaya Penurunan Emisi

Meningkatnya kadar gas rumah kaca telah menyebabkan kenaikan suhu bumi. Begitu seriusnya ancaman tersebut, sampai-sampai Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, menyebutnya "mengerikan seperti dalam fiksi ilmiah (*science fiction*), tetapi nyata". Penimbunan gas rumah kaca (GRK) di atmosfer diyakini akan menyebabkan pemanasan bumi antara 1,8 hingga 4 derajat celcius dalam satu abad ini. Padahal, kenaikan suhu 2,5 derajat celcius saja sudah cukup untuk memusnahkan sepertiga spesies yang hidup saat ini. Sebagian besar penimbunan GRK tersebut ditimbulkan dari pemakaian bahan bakar fosil. Ada beberapa langkah yang mesti diambil oleh umat manusia untuk mengurangi pengaruh pemakaian energi terhadap dampak perubahan iklim, diantaranya

Penghematan energi

Menghemat pemakaian energi akan mengurangi jumlah bahan bakar yang digunakan dan otomatis juga mengurangi pengeluaran GRK yang ditimbulkan. Salah satu cara penghematan energi adalah melalui efisiensi, yaitu mengurangi pemakaian energi tanpa harus mengurangi produk atau jasa yang ingin diperoleh. Efisiensi dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi. Seperti menciptakan rumah, mobil dan mesin-mesin yang hemat energi. Cara lain adalah dengan melakukan pendekatan sistemik seperti menyediakan transportasi massal untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Diantara berbagai cara pengurangan emisi GRK, upaya efisiensi sesungguhnya memiliki potensi yang paling besar. Namun sayangnya upaya ini masih kurang mendapat perhatian. Selain melalui efisiensi, penghematan energi bisa juga dilakukan dengan melalui konservasi energi. Konservasi energi pada prinsipnya adalah upaya mengurangi pemakaian energi dengan mengurangi permintaan produk atau jasa. Upaya ini bisa diwujudkan melalui perubahan gaya hidup. Contoh yang sederhana adalah dengan mengurangi budaya konsumtifisme dan dengan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan bermotor dengan cara membudayakan bersepeda atau berjalan kaki.

Carbon capture (penangkapan karbon)

Dengan teknologi *carbon capture*, karbon dioksida dari hasil pembakaran bahan bakar fosil tidak dilepaskan begitu saja ke atmosfer namun dipisahkan dari gas buang dan selanjutnya disimpan untuk selamanya di dalam perut bumi atau di dasar laut. Disamping itu, berkembang pula ide untuk memanfaatkan karbon dioksida yang telah dipisahkan tadi untuk budidaya tanaman algae yang selanjutnya bisa dipanen sebagai sumber minyak nabati.

Mengganti bahan bakar

Bahan bakar fosil yang menyebabkan emisi GRK paling tinggi adalah batu bara,

sedangkan yang paling kecil adalah gas alam. Dengan kenyataan tersebut maka penggantian batu bara dengan gas alam diyakini mampu mengurangi emisi GRK secara signifikan.

Pemanfaatan energi terbarukan

Di masa mendatang energi terbarukan akan menjadi andalan pemenuhan sumber energi umat manusia. Selain ramah lingkungan, potensi energi terbarukan juga sangat besar. Energi matahari yang jatuh ke bumi jumlahnya 10 ribu kali lipat dari jumlah seluruh energi yang dibutuhkan umat manusia saat ini. Sebagian dari energi tersebut berubah menjadi energi angin, energi gelombang, dan menjadi tenaga untuk memutar siklus air di bumi. Namun sebagian besar energi matahari tidak dimanfaatkan dan hanya dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi ke ruang angkasa. Kita patut bersyukur karena Indonesia dikaruniai begitu banyak sumber energi terbarukan. Selain sumber energi yang bersumber dari matahari (termasuk energi air dan gelombang), Indonesia juga memiliki potensi energi panas bumi yang sangat besar dan sesungguhnya mampu mencukupi seluruh kebutuhan listrik nasional yang ada saat ini. Namun rupanya, upaya pemanfaatan energi terbarukan, khususnya di negara kita, masih jauh dari memuaskan.

c. Studi Kasus

d. Kesimpulan

e Daftar Pustaka

BAB VI BIODIVERSITY

a. Konsep Keanekaragaman hayati

Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan, yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya.

Pentingnya Keanekaragaman Hayati (Biodiversity):

A. Satu jenis tidak mampu melakukan berbagai fungsi dalam menunjang

- sebuah kehidupan
- B. Kehidupan yang harmoni akan terjadi apabila masing-masing komponen menjalankan fungsinya dengan baik, dan setiap komponen tidak dapat menggantikan komponen lainnya
 - C. membantu kita memahami bagaimana kehidupan berkembang dan terus berkembang.

Keanekaragaman hayati (Biodiversity) tidak merata, melainkan sangat bervariasi di seluruh dunia. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah keragaman makhluk hidup (biota) yang tergantung pada suhu, curah hujan, ketinggian, geografi tanah, serta unsur-unsur kimiawi yang terlarut dalam komponen abiotik dan kehadiran spesies lainnya. Berbagai manfaat yang diberikan oleh Kehati menurut mendukung kehidupan manusia di bumi adalah kurang lebih sebagai berikut:

- a) Kebutuhan, sebagai sumber makanan dalam bidang pertanian, peternakan, ikan dan makanan laut
- b) Kesehatan dan Penelitian biomedis: terumbu karang adalah rumah bagi ribuan spesies yang dapat dikembangkan menjadi obat-obatan untuk menjaga kesehatan manusia dan untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit
- c) Keseimbangan hidup dan Industri: tekstil, bahan bangunan, kosmetik, dll
- d) Esterika, Pariwisata dan rekreasi: Pantai, hutan, taman, ekowisata
- e) Saldo Bank semua bentuk kehidupan di bumi

b. Kehati dan Pembangunan Nasional

Indonesia adalah satu satu Negara Megabiodiversiti dari 12 Negara Megabiodiversiti yang mengandung sekitar 75% keanekaragaman hayati bumi, yakni Brazil, Kolombia, Ekuador, Peru, Meksiko, Republik Demokratik Kongo, Madagaskar, Cina, India, Australia dan Malaysia. Karena itu, Indonesia mempunyai tanggung jawab khusus untuk mengkonservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dengan melakukan konservasi dan mengelolah keanekaragaman hayati yang ada, Indonesia akan menyelamatkan berbagai spesies dari tiga tipe spesies di dunia, yakni tipe Asia, tipe Australia dan Endemik/s Indonesia.

Sebagai Negara *megabiodiversity*, *Indonesia* juga kaya akan tanaman obat, dan sangat potensial untuk dikembangkan, namun belum dikelola secara maksimal. Kekayaan alam tumbuhan di Indonesia meliputi 30.000 jenis tumbuhan dari total 40.000 jenis tumbuhan di dunia, 940 jenis diantaranya merupakan tumbuhan berkhasiat obat (jumlah ini merupakan 90% dari jumlah tumbuhan obat di Asia). Berdasarkan hasil penelitian, dari sekian banyak jenis tanaman obat, baru 20-22% yang dibudidayakan. Sedangkan sekitar 78% diperoleh melalui pengambilan langsung (eksplorasi) dari hutan. Potensi tanaman obat di Indonesia, termasuk

tanaman obat kehutanan, apabila dikelola dengan baik akan sangat bermanfaat dari segi ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan. Negara berkembang mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan baku produk farmasi (38% untuk *medical* dan *aromatic plants*, 24% untuk *vegetables saps* dan *extract*, dan 11% untuk *vegetables alkaloids*). Tahun 2005, Uni Eropa tercatat sebagai *net importir* rempah dan herbal dengan total impor 358,2 ribu ton dan terus meningkat 4% per tahun sejak tahun 2003. Sebanyak 60% dari total rempah dan herbal Uni Eropa berasal dari negara berkembang, namun bukan berasal dari Indonesia melainkan Cina, India, Maroko dan Turki. Ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk pengembangan ekspor tanaman obat ke pasar Uni Eropa.

c. Kehati dan Pariwisata Hijau

Mengingat pentingnya Kehati bagi kehidupan, maka yang hendaknya dilakukan adalah (a)melindungi, (b)melestarikan, dan mengembangkan *biodiversity* suatu kawasan tertentu berdasarkan pertimbangan geografis.

Contohnya seperti Papua. Seberapapun banyaknya Kabupaten/kota atau Propinsi yang sedang dimekarkan, seberapapun besar dan jumlah bisnis ekonomi yang sedang dirintis dan dikembangkan, Kehati pada semua kawasan di tanah Papua perlu dipertimbangkan dan menjadi prioritas, serta acuan utama.

Karena itu, yang hendaknya dilakukan adalah (a)sebisa mungkin mempertahankan Kehati, apa adanya, (b)pembangunan berbagai fasilitas perkantoran hendaknya dilakukan di lokasi yang tandus, termasuk ekonomi bisnis dan berbagai pertanian, perkebunan dan peternakan konvensional, serta beberapa jenis kegiatan olah raga yang tidak ada hubungannya dengan air dan gunung, (c)membuat system penanganan dan pengolahan berbagai jenis sampah dengan system dan paradikma yang berkelanjutan, sehingga tidak merugikan pihak lain.

Penanganan, pengembangan dan proteksi terhadap *biodiversity* pada suatu kawasan, contohnya seperti Papua, hendaknya dilakukan dengan mengacu kepada sebuah flat form bersama. Dalam pelaksanaannya, disesuaikan dengan pemahaman budaya setempat melalui program kemitraan yang seimbang dan berkesinambungan. Hanya dengan cara ini *biodiversity* sebuah kawasan sehat dan akan memberi kenikmatan hidup yang baik bagi semua makhluk di Papua.

Mempertahankan keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies dan keanekaragaman gen spesies di setiap ekosistem, berarti mempertahankan jaringan kehidupan yang menopang semua makhluk hidup. Dalam karyanya 1992 best-seller, " The Diversity of Life , " ahli biologi Universitas Harvard Edward O. Wilson – yang dikenal sebagai " bapak keanekaragaman hayati , " berkata, " Ini adalah ceroboh untuk menganggap bahwa keanekaragaman hayati dapat dikurangi

tanpa batas tanpa mengancam kemanusiaan itu sendiri". Keanekaragaman hayati (Kehati) merupakan bagian penting dari layanan ekologi yang membuat hidup layak huni di Bumi. Ketika Kehati terganggu, kelayakan hidup terganggu pula. Tetap ketika Kehati hancur dan lenyap, maka hancur dan lenyaplah pula kehidupan di bumi karena bumi tidak layak lagi untuk dihuni.

Kehati juga berhubungan dengan kegiatan pariwisata hijau atau dalam istilah lain disebut dengan ekowisata. Kegiatan ekowisata harus bersifat ramah lingkungan, secara ekonomis dapat berkelanjutan dan serasi dengan kondisi sosial dan kebudayaan Daerah Tujuan Ekowisata (DTE). Untuk menjamin konservasi alam dan keanekaragaman hayati sebagai sumber daya kepariwisataan utama, segenap upaya penting harus dilaksanakan untuk menjamin fungsi dan daya dukung lingkungan agar tetap terjaga. Kegiatan ekowisata yang secara langsung mendukung pada upaya perlindungan alam dan kelestarian keanekaragaman hayati harus dipromosikan. Harus ada tindakan pencegahan untuk menghindari dan meminimalkan dampak negatif keanekaragaman hayati yang disebabkan kegiatan ekowisata. Pengembangan kegiatan ekowisata hendaknya selalu menggunakan teknologi ramah lingkungan. Semua yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata, termasuk pemerintah swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus bertanggungjawab secara bersama untuk mencapai bentuk ekowisata yang berkelanjutan. Konsep dan kriteria ekowisata berkelanjutan harus dikembangkan dan dikaitkan dengan program pendidikan dan pelatihan untuk pekerja dibidang kepariwisataan.

Masyarakat harus diberikan kemudahan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai manfaat perlindungan lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati melalui bentuk ekowisata yang berkelanjutan tadi. Dalam mengembangkan ekowisata seharusnya dilihat sebagai alat peningkatan komunikasi antar makhluk hidup, kesejahteraan, dan kemampuan individu. Oleh karena itu, pengembangan suatu kawasan untuk menjadi obyek ekowisata harus didasarkan pada kebijakan yang dirumuskan dari hasil musyawarah dan mufakat dengan masyarakat setempat. Dalam mengembangkan ekowisata juga, sangat penting kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terutama dalam memberdayakan masyarakat setempat melalui pendekatan, penyebaran informasi tentang keuntungan, manfaat, dan dampak negatif yang mungkin muncul dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan. Dalam ekowisata ada empat unsur yang dianggap amat penting, yaitu unsur pro-aktif, kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup, keterlibatan penduduk lokal, unsur pendidikan. Wisatawan yang datang tidak semata-mata untuk menikmati alam sekitarnya tetapi juga mempelajarinya sebagai peningkatan pengetahuan atau pengalaman.

BAB VII

SAWAH, SUBAK, DAN SUSTAINABILITY

Tantangan Subak ke depan

Subak merupakan suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sosioagraris-religius, yang merupakan perkumpulan para petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah. Pengertian subak seperti itu pada dasarnya dinyatakan dalam peraturan daerah pemerintah Provinsi Bali No. 02/PD/DPRD/1972. Arif (1999) memperluas pengertian karakteristik sosio-agraris-religius dalam sistem irigasi subak, dengan menyatakan lebih tepat subak itu disebut berkarakteristik sosio-teknis-religius, karena pengertian teknis cakupannya menjadi lebih luas, termasuk diantaranya teknis pertanian dan teknis irigasi.

Subak sebagai suatu sistem irigasi merupakan teknologi sepadan yang telah menyatu dengan sosio-kultural masyarakat setempat, kesepadanan teknologi sistem subak ditujukan oleh anggota subak tersebut melalui pemahaman terhadap cara pemanfaatan air irigasi yang berlandaskan Tri Hita Karana yang menyatu dengan cara membuat bangunan dan jaringan fisik irigasi, cara mengoperasikan, koordinasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pekaseh (ketua subak), bentuk kelembagaan, dan informasi untuk pengelolannya.

Sistem subak mampu melakukan pengelolaan irigasi dengan dasar-dasar harmoni dan kebersamaan sesuai dengan prinsip konsep THK, dan dengan dasar itu sistem subak mampu mengantisipasi kemungkinan kekurangan air (khususnya pada musim kemarau), dengan mengelola pelaksanaan pola tanam sesuai dengan

peluang keberhasilannya. Sistem subak di Bali adalah merupakan satu warisan budaya Bali yang patut dibanggakan. Sebagai suatu sistem irigasi, subak terbaik di dunia. Apa ukurannya? Pertama, subak mengelola sistem irigasinya berdasarkan pola-pikir harmoni dan kebersamaan yang berlandaskan pada aturan-aturan formal dan nilai-nilai agama. Kedua, bentuk organisasinya yang fleksibel (sesuai dengan kepentingan setempat). Berdasarkan keunggulan-unggulan yang dimiliki sistem subak yang lengkap (seperti yang disebutkan di atas), subak sering disebut-sebut oleh para ahli irigasi sebagai suatu sistem irigasi masa depan.

Apa yang disebutkan sebagai kelebihan dan kekurangan dari sistem subak di Bali, pada dasarnya merupakan kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh sistem irigasi tradisional pada umumnya. Namun sistem irigasi tradisional seperti halnya sistem subak, bukanlah tanpa kelemahan-kelemahan. Kelemahan paling menonjol dari sistem irigasi tradisional (termasuk sistem subak) adalah ketidakmampuannya untuk membendung pengaruh luar yang menggerogoti artefaknya, yang terwujud dalam bentuk alih fungsi lahan, sehingga eksistensi subak menjadi terseok-seok.

Ada tiga hal yang menarik saat ini, yaitu: (1) apa tantangan-tantangan yang dihadapi subak baik masa kini maupun masa datang; (2) apakah subak mampu mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut; (3) upaya apa yang perlu ditempuh untuk memberdayakan subak atau memperkuat kelembagaan subak agar tetap eksis menghadapi berbagai tantangan masa kini maupun masa datang.

TANTANGAN-TANTANGAN YANG DIHADAPI SUBAK

Subak sedang menghadapi bermacam tantangan, lebih-lebih dalam menyongsong era globalisasi yang jika tidak teratasi maka kelangsungan hidup subak bisa terancam. Tantangan tantangan tersebut antara lain dapat diuraikan di bawah ini:

1. Persaingan dalam Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian

Sektor pertanian mau tidak mau harus terbuka untuk investasi asing dan dituntut agar mampu bertahan pada kondisi persaingan bebas tanpa subsidi dari pemerintah. Untuk mampu bersaing dalam pasar ekonomi global maka mutu hasil –hasil pertanian perlu ditingkatkan. Ini berarti bahwa mutu sumber daya manusia termasuk para petani produsen perlu terus ditingkatkan agar menjadi lebih profesional, efisien dan mampu menguasai serta memanfaatkan teknologi. Para petani anggota subak selama ini masih bertindak sendiri-sendiri secara individual dalam berusaha tani. Padahal, mereka tergolong petani gurem dengan luas garapan yang sempit, permodalan yang terbatas dan posisi tawar yang sangat lemah. Mereka belum memanfaatkan kelembagaan subak sebagai wadah bersama untuk melakukan

kegiatan usaha tani yang lebih berorientasi agribisnis. Dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam maka seharusnya para petani bersatu melalui suatu wadah yang sudah ada yaitu subak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi agribisnis bukan sekedar menggunakan wadah subak itu hanya untuk tujuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

2. Alih Fungsi Lahan

Salah satu tantangan yang dihadapi subak adalah menciutnya lahan sawah beririgasi sebagai akibat adanya alih fungsi untuk kegiatan non-pertanian. Di Bali dalam beberapa tahun belakangan ini areal persawahan yang telah beralih fungsi diduga mencapai 1000 ha per tahun. Penciutan areal sawah ini sungguh pesat. Andaikata penyusutan areal persawahan di Bali berlanjut terus seperti sekarang ini dikhawatirkan organisasi subak akan terancam punah. Jika subak hilang apakah kebudayaan Bali dapat bertahan karena diyakini bahwa subak bersama lembaga sosial tradisional lainnya seperti banjar dan desa adat merupakan tulang punggung kebudayaan Bali. Dalam kaitan ini para petani anggota subak perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masalah pengalih fungsian lahan sawah yang berada dalam wilayah subak mereka.

3. Ketersediaan Air Semakin Terbatas

Meningkatnya pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk serta pembangunan disegala bidang terutama pemukiman dan industri pariwisata di Bali menuntut terpenuhinya kebutuhan air yang terus meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Ini mengisyaratkan bahwa air menjadi sumberdaya yang semakin langka. Persaingan yang menjurus ke arah konflik kepentingan dalam pemanfaatannya antara berbagai sektor terutama sektor pertanian dan non pertanian cenderung meningkat di masa-masa mendatang. Mengingat air menjadi semakin langka maka para petani anggota subak dituntut untuk mampu mengelola air secara lebih efisien dan demikian pula para pemakai air lainnya agar mampu mengembangkan budaya hemat air.

4. Meningkatnya Kerusakan Lingkungan

Di beberapa tempat telah muncul keluhan-keluhan dari masyarakat petani tentang adanya pencemaran lingkungan khususnya sumberdaya air pada sungai dan saluran irigasi akibat adanya limbah industri dan limbah dari hotel serta pemukiman. Kecenderungan menurunnya kualitas air ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah industry yang mengeluarkan limbah beracun yang disalurkan melalui sungai maupun saluran irigasi. Dalam kaitan ini subak dituntut untuk mampu berperan aktif dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

5. Berkurangnya Minat Pemuda Sebagai Petani

Ada kecenderungan bahwa berusaha tani di sawah dianggap tidak lagi dapat mendukung peningkatan kesejahteraan petani dibandingkan dengan bekerja di sektor industri dan jasa khususnya yang berkaitan dengan pariwisata. Hal ini disebabkan karena sempitnya luas tanah garapan dan rendahnya nilai tukar petani. Bekerja di luar sektor pertanian cenderung lebih menarik dibandingkan jadi petani yang serba bergelimpang lumpur dan penuh resiko akibat kegagalan panen dan fluktuasi harga. Dapat dimengerti kalau pemuda-pemuda desa dari keluarga petani cenderung meninggalkan orang tua mereka dan pergi ke kota mencoba mencari pekerjaan yang lebih bergengsi. Dapat diduga pula bahwa dalam beberapa tahun mendatang yang tinggal di daerah pedesaan bekerja sebagai petani adalah orang-orang yang sudah berusia lanjut yang tentunya kurang produktif lagi. Kecenderungan ini kiranya dapat berimplikasi negatif terhadap kehidupan subak itu sendiri. Subak sebagai organisasi petani dituntut untuk mampu menciptakan kondisi yang dapat menarik kaum muda untuk bekerja sebagai petani modern dan profesional.

KEMAMPUAN SUBAK MENGHADAPI BERBAGAI TANTANGAN

Kalau dilihat dari kenyataan bahwa subak masih tetap eksis sampai kini sejak awal berdirinya yaitu hampir seribu tahun yang lampau, maka kiranya perlu optimis bahwa subak akan mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Namun perlu digaris bawahi bahwa masih diperlukan upaya-upaya pemberdayaan terhadap lembaga irigasi tradisional ini guna meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi berbagai tantangan yang menghadang. Subak rupanya memang memiliki potensi yang cukup memadai untuk menjadi lembaga yang tangguh (*viable*) seperti terlihat dari hal-hal berikut: Organisasi yang relatif mantap seperti adanya struktur yang jelas, kepengurusan yang jelas wewenang dan tanggung jawabnya, dilengkapi dengan *awig-awig* (peraturan-peraturan) dengan berbagai sanksinya. Setiap anggota subak berhak melakukan pengawasan dan monitoring terhadap siapa saja termasuk pengurusnya dalam menerapkan peraturan yang telah disepakati bersama. Semangat gotong-royong yang tinggi dalam melakukan kegiatan-kegiatan persubakan terutama dalam pemeliharaan jaringan fisik dan kegiatan ritual subak. Ritual subak merupakan unsur pemersatu para anggotanya sehingga subak menjadi organisasi yang kuat dan tangguh. Subak memiliki batas wilayah yang jelas dan berdasarkan prinsip hidrologis bukan atas dasar kesatuan administratif. Subak mempunyai landasan filosofis *Tri Hita Karana* yang menekankan pada keseimbangan dan keharmonisan yakni keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dengan sesamanya, dengan alam lingkungannya dan dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala yang ada di alam semesta ini. Ini berarti bahwa subak memiliki potensi yang sangat besar untuk berperan sebagai pengelola sumberdaya alam guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Subak memiliki mekanisme penanganan konflik yang timbul di kalangan anggotanya maupun antara anggota subak yang bersangkutan dengan anggota dari subak lain. *Awig-awig* dapat diubah dan disesuaikan menurut keadaan yang selalu berubah berdasarkan kesepakatan seluruh anggota subak. Penggalan dana sebagai salah satu fungsi penting dari subak untuk membiayai perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi serta untuk keperluan penyelenggaraan ritual. Banyak subak telah menunjukkan kemampuannya menggali dana dengan berbagai cara seperti melalui usaha simpan pinjam, pengumpulan denda, pemungutan iuran dari anggota, menyewakan areal persawahan subak untuk pengembalaan itik, dll (Sutawan, dkk., 1995).

Selain potensi ataupun kekuatan-kekuatan yang terdapat pada subak, ternyata subak tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah: Belum dimilikinya status badan hukum oleh sebagian besar subak di Bali. Sempitnya luas garapan petani anggota subak dan banyak yang berstatus sebagai penyakap. Kurangnya pemilikan modal dan terbatasnya akses perkreditan yang dimiliki petani / subak. Lemahnya posisi tawar petani karena bertindak sendiri-sendiri secara individual dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil-hasil pertanian. Terbatasnya kemampuan petani di bidang teknologi budidaya non padi mulai dari proses produksi sampai pengolahan pasca panen. Terbatasnya kemampuan managerial dan wirausaha di kalangan petani. Lemahnya penguasaan petani atas informasi pasar terutama yang berkaitan dengan jumlah kebutuhan, harga, waktu, kualitas, sistem pembayaran, dll. Kurangnya pengetahuan dan penguasaan teknologi dalam bidang pelestarian sumberdaya alam khususnya sumberdaya air.

Tantangan-tantangan yang dihadapi itu diharapkan dapat dijadikan sebagai peluang oleh subak itu sendiri untuk memotivasi para anggotanya supaya mau dan mampu memanfaatkan subak sebagai wadah bersama dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Diharapkan pula agar suatu saat subak dapat berkembang sebagai lembaga yang mampu memainkan berbagai peran sesuai dengan tuntutan –tuntutan masa depan.

a. Ketahanan Pangan Bali

Dalam beberapa tahun belakangan ini, masalah ketahanan pangan menjadi isu penting di Indonesia, dan dalam setahun belakangan ini dunia juga mulai dilanda oleh krisis pangan. Menurut Sunday Herald (12/3/2008), krisis pangan kali ini menjadi krisis global terbesar abad ke-21, yang menimpa 36 negara di dunia, termasuk Indonesia. Santosa (2008) mencatat dari pemberitaan di Kompas

(21/1/2007) bahwa akibat stok yang terbatas, harga dari berbagai komoditas pangan tahun 2008 ini akan menembus *level* yang sangat mengkhawatirkan. Harga seluruh pangan diperkirakan tahun ini akan meningkat sampai 75% dibandingkan tahun 2000; beberapa komoditas bahkan harganya diperkirakan akan mengalami kenaikan sampai 200%. Harga jagung akan mencapai rekor tertinggi dalam 11 tahun terakhir, kedelai dalam 35 tahun terakhir, dan gandum sepanjang sejarah.

Ada yang berpendapat bahwa krisis pangan global sekarang ini adalah hasil dari kesalahan kebijakan dari lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia dan IMF (Dana Moneter Internasional) dan juga kesalahan kebijakan dari banyak negara di dunia, termasuk negara-negara yang secara potensi adalah negara besar penghasil beras seperti Indonesia, India dan China. Schutter, misalnya, ketua FAO (badan PBB yang menangani pangan dan pertanian) mengatakan bahwa Bank Dunia dan IMF menyepelkan pentingnya investasi di sektor pertanian. Salah satu contohnya adalah desakan dari kedua badan dunia ini kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menghasilkan komoditas berorientasi ekspor, terutama manufaktur, dengan mengabaikan. Saran atau desakan ini juga diberikan oleh IMF kepada pemerintah Indonesia pada masa Soeharto, dan bahkan dipaksakan setelah krisis ekonomi 1997/98, yakni mengurangi secara drastis peran Bulog. Akibatnya, terjadi kekacauan manajemen pangan karena semuanya diserahkan kepada sektor swasta. Walaupun belum ada bukti secara ilmiah bahwa mengecilnya peran Bulog dalam era pasca krisis sekarang ini menjadi penyebab utama lemahnya ketahanan pangan di Indonesia, namun sudah pasti bahwa reformasi Bulog tersebut turut berperan.

Ketahanan pangan di Bali memiliki tantangan tersendiri. Ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, minimal dalam tiga hal. Pertama, akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak yang paling asasi bagi manusia. Kedua adalah pangan memiliki peranan penting dalam pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas. Ketiga, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Program peningkatan ketahanan pangan diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di dalam negeri dari produksi pangan nasional. Disamping itu, program tersebut juga diarahkan pada kemandirian masyarakat/petani yang berbasis sumberdaya lokal yang secara operasional dilakukan melalui program peningkatan produksi pangan; menjaga ketersediaan pangan yang cukup dan beragam (diversifikasi pangan), aman, dan halal di setiap daerah setiap saat; dan antisipasi agar tidak terjadi kerawanan pangan.

Diversifikasi pangan pada dasarnya mencakup aspek produksi, konsumsi, pemasaran, dan distribusi. Dari aspek produksi, diversifikasi berarti

penganekaragaman komoditas pangan dalam pemanfaatan sumberdaya, perusahaan maupun pengembangan produk (diversifikasi horizontal dan vertikal). Diversifikasi pangan dari aspek konsumsi mencakup perilaku yang didasari pertimbangan ekonomis (pendapatan dan harga komoditas) dan non ekonomis (selera, kebiasaan, dan pengetahuan). Diversifikasi pangan dan pola konsumsi ini secara dinamis mengalami perubahan. Jadi, diversifikasi pangan selain merupakan upaya mengurangi ketergantungan pada beras, juga penganekaragaman dari beras ke sumber kalori dan protein lainnya yang lebih berkualitas (Darmawati, 1998).

Arifin (2001) menyatakan bahwa ketersediaan dan kecukupan pangan juga mencakup kuantitas dan kualitas bahan pangan agar setiap individu dapat terpenuhi standar kebutuhan kalori dan energi untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Penyediaan pangan tentunya dapat ditempuh melalui produksi sendiri dengan cara memanfaatkan dan alokasi sumberdaya alam, manajemen dan pengembangan sumberdaya manusia, serta aplikasi dan penguasaan teknologi yang optimal.

Salah satu usaha untuk mendukung program peningkatan produksi pangan adalah melalui diversifikasi usahatani yang merupakan salah satu program pokok pembangunan pertanian. Program pengembangan diversifikasi usahatani di lahan sawah dikaitkan dengan upaya peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, merupakan salah satu pilihan strategi yang tepat. Strategi diversifikasi usahatani pada dasarnya adalah optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (lahan, tenaga kerja, dan modal). Pemanfaatan lahan sawah di Bali pada tahun 2009 dengan luas lahan sawah 81.931 ha, selain untuk usahatani padi juga dilakukan diversifikasi usahatani seperti usahatani jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar (Anonim, 2010a).

c. Studi Kasus

d. Kesimpulan

e. Daftar Pustaka

BAB VIII

CSR (*Corporate Cosial Responsibility*)

a. Pengenalan CSR

Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) yang

jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban. Pemikiran yang mendasari CSR (corporate social responsibility) yang sering dianggap inti dari Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas.

Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini antara lain adalah tatalaksana perusahaan (corporate governance) yang sekarang sedang marak di Indonesia, kesadaran perusahaan akan lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahaan-masyarakat, investasi sosial perusahaan (corporate philanthropy). Berdasarkan teori diatas, disini akan membahas tentang CSR (corporate social responsibility) dan bagaimana manfaat-manfaat bagi masyarakat dan keuntungan bagi perusahaan dan contoh perusahaan yang telah menerapkan CSR.

Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak – for better or worse, bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang saham. Melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Menurut Kotler dan Nancy (2005) Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Menurut CSR Forum (Wibisono, 2007) Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan.

Keuntungan CSR bagi perusahaan :

I. Layak Mendapatkan sosial licence to operate

Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan, maka dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan yang diberikan kepada perusahaan adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut.

D. Mereduksi Resiko Bisnis Perusahaan

Mengelola resiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Disharmoni dengan stakeholders akan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan. Bila sudah terjadi permasalahan, maka

biaya untuk recovery akan jauh lebih berlipat bila dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan program Corporate Social Responsibility. Oleh karena itu, pelaksanaan Corporate Social Responsibility sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya hubungan dengan stakeholders perlu mendapat perhatian.

3 Melebarkan Akses Sumber Daya

Track records yang baik dalam pengelolaan Corporate Social Responsibility merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.

4 Membentangkan Akses Menuju Market

Investasi yang ditanamkan untuk program Corporate Social Responsibility ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.

5 Mereduksi Biaya

Banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan dengan melakukan Corporate Social Responsibility. Misalnya: dengan mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi. Selain dapat menghemat biaya produksi, juga membantu agar limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan.

6 Memperbaiki Hubungan dengan Stakeholder

Implementasi Corporate Social Responsibility akan membantu menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholder, dimana komunikasi ini akan semakin menambah trust stakeholders kepada perusahaan.

7 Memperbaiki Hubungan dengan Regulator

Perusahaan yang melaksanakan Corporate Social Responsibility umumnya akan meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

8 Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan

Image perusahaan yang baik di mata stakeholders dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan, akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka.

9 Peluang Mendapatkan Penghargaan

Banyaknya penghargaan atau reward yang diberikan kepada pelaku Corporate Social Responsibility sekarang, akan menambah kans bagi perusahaan untuk mendapatkan award.

Manfaat CSR bagi masyarakat

CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat; ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama

pemerintah. Studi Bank Dunia (Howard Fox, 2002) menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindari proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu (profit), masyarakat (people), dan lingkungan (planet). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan multiplier effect yang diharapkan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggungjawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.

Studi kasus CSR- Praktik CSR di Bali dan Indonesia

Perkembangan kegiatan CSR di industri hotel pada masa kini Intercontinental Hotel Group

Intercontinental Hotel Group sebagai salah satu grup hotel terbesar di dunia dengan jumlah hotel sekitar 3,300 hotel dengan *brand* seperti *InterContinental*, *Crowne Plaza*, *Staybridge Suites*, *Holiday Inn* dan *Express by Holiday Inn* yang tersebar di hampir 100 negara, mempunyai komitmen dan inisiatif pada program CSR yang mereka sebut dengan Business Responsibility. Intercontinental Hotel Group sudah memulai program amal sejak tahun 1977, tetapi pada masa itu belum ada konsep Social Responsibility yang jelas. Yang menjadi dasar pemikiran dari grup IHG melaksanakan program CSR yaitu IHG menyadari pentingnya peranan komunitas lokal dalam operasional harian hotel serta program CSR yang mereka jalankan terhadap masyarakat ternyata berpengaruh besar. Tetapi pada masa itu aktivitas CSR yang dilakukan hanyalah menanggapi permintaan sumbangan atau amal dari organisasi atau badan tertentu yang membutuhkan selama permintaan organisasi tersebut sejalan dengan visi program amal dari grup IHG. Namun sejalan dengan waktu, grup IHG menyadari bahwa program dengan aktivitas hanya menanggapi permintaan sumbangan menjadikan permintaan ini tidak ada arah yang jelas, tidak ada tujuan khusus yang dicapai dan sangat sulit untuk bisa merangkul keterlibatan baik karyawan maupun tamu hotel.

Sejak tahun 2001, grup IHG menciptakan program sosial sendiri yang mempunyai arah yang jelas serta ingin meningkatkan keterlibatan partisipasi dari karyawan dan tamu hotel. Program ini dimulai dengan menggandeng UNICEF dengan cara menjual pensil UNICEF seharga 6 *pence* di semua hotel IHG dimana tujuan dari penggalangan dana ini untuk membiayai pendidikan. Dengan program penjualan pensil ini, program CSR menjadi lebih terarah dan transparan karena tujuannya jelas yaitu untuk membantu pendidikan, selain itu program ini ternyata bisa meningkatkan keterlibatan baik dari tamu-tamu hotel maupun karyawan karena mereka merasa dengan membeli pensil ini berarti mereka membantu peningkatan pendidikan.

Dari dana yang terkumpul, maka pada 2002 dilaksanakan implementasi dari program peningkatan pendidikan di Filipina tersebut. Caranya yaitu dengan meningkatkan kemampuan pengajaran para guru di berbagai tingkatan,

membangun sarana dan fasilitas pendidikan yang memadai di sekolah-sekolah (perpustakaan, bahan-bahan untuk praktikum ilmu eksata, fasilitas kelas) dan juga membangun sanitasi yang memadai untuk sekolah-sekolah tersebut. Selain itu, pada tahun 2002 grup IHG juga mendonasikan uang dan barang kepada organisasi yang visi utamanya adalah untuk peningkatan komunitas, karyawan, seni, orang muda & pendidikan, lingkungan dan hak asasi manusia seperti: included UNICEF, *the September 11 Fund, Victim Support, Children In Need, the Red Cross, Water Aid, WWF, UNEP and Give Kids the World*. Ternyata menurut data IHG, dengan program yang terarah dan transparan, hasil yang dikumpulkan untuk program CSR dari para pelanggan, tamu dan karyawan terjadi kenaikan rata-rata £ 8juta per tahun. Tentu hal ini sangat membanggakan dan menunjukkan bahwa kepedulian sosial di tingkat masyarakat juga sudah meningkat.

Grup IHG mengaitkan program CSR dalam keseluruhan bisnis strategi mereka dimana hal ini menjadikan grup ini benar-benar mendukung komunitas masyarakat di lingkungan hotel dan hal ini relevan dengan operasional karyawan sehari-hari. Satu hal yang unik adalah program CSR untuk tiap hotel tidak dibuat oleh kantor pusat melainkan dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal dimana hotel itu berada sehingga setiap *General Manager* bebas menentukan program yang sesuai dengan komunitas lokal dan tidak harus selalu bermitra dengan UNICEF. Dengan keberagaman program CSR yang ada di grup IHG hal ini menjadikan grup IHG tampak 'beda' dalam pelaksanaan CSR dengan grup hotel yang lain. Hal ini ditegaskan oleh James Wilson, *Vice President* terdahulu, seperti yang disampaikan oleh *Head of Public Affairs*, "*If the CEO and board do genuinely believe that vision and CSR values differentiate the company, then this can make a real difference. Paying lip service is no good, your strategy and action must have real substance*".

Contoh nyata dari keberagaman program CSR di tiap negara dari grup IHG adalah:

(1) InterContinental Amstel Amsterdam (*Sourcing local, sustainable and organic ingredients*). InterContinental Amstel Amsterdam menerapkan konsep kesegaran dalam semangat *Responsible Business* mereka. Kesegaran yang dimaksud adalah dalam produk makanan mereka hanya menggunakan bahan-bahan organik dan diproduksi lokal di Belanda. Tujuannya adalah sebagai pesan bisnis yang berkelanjutan (karena menggunakan bahan-bahan lokal), lalu juga untuk menghargai alam dan promosi makanan sehat karena berbahan organik.

(2) Semiramis InterContinental Cairo (*Donating waste paper that is recycled to produce hand made crafts, sold within the hotel*). Semiramis InterContinental Kairo,

Mesir, menyumbangkan semua limbah kertas kepada the Association of the Protection of the Environment (organisasi non profit yang membuat produk kerajinan dari kertas yang di daur ulang). Setelah limbah kertas disumbangkan dan dibuat kerajinan kertas, maka produk-produk ini dibeli lagi oleh hotel untuk dijual sebagai souvenir hotel dan juga dibagikan kepada anggota klub eksekutif Ambassador Club.

(3) InterContinental Resort Bora Bora Thalasso Spa (*Preserving the natural habitat of its location*). InterContinental Resort Bora Bora Thalasso Spa yang terkenal karena berada di perairan yang indah dan kehidupan liar laut sangat mengandalkan keindahan lautnya sebagai daya tarik wisata.

Maka untuk tetap menjaga keindahan alamnya, InterContinental Resort Bora Bora Thalasso Spa menciptakan program bersama dengan organisasi yang mendukung regenerasi hamparan koral dan hewan laut. Program regenerasi ini membutuhkan keahlian tinggi, cara ini akan membantu melindungi dan meregenerasi koral sehingga di tahun-tahun mendatang penduduk lokal dan tamu-tamu atau turis masih bisa menikmati keindahan alam ini. (4) InterContinental Harbor Court Baltimore (Regenerating Chesapeake Bay through Oyster Recovery Programme). Hotel yang terletak di timur dari Teluk Chesapeake berkomitmen untuk melestarikan Teluk sehingga penduduk lokal dan tamu-tamu hotel akan terus merasakan keindahan Teluk. Mereka membuat program yang dinamakan *The Oyster Recovery Programme* yang bertujuan untuk meregenerasi kerang tiram sehingga kerang tiram ini tetap mempunyai sarang dan program memancing akan bisa terus berlanjut di teluk ini.

d. Studi Kasus

e. Kesimpulan

f. Daftar Pustaka

BAB IX

Tri Hita Karana (sosial budaya)

a. THK dalam perspektif pariwisata

Tri Hita Karana adalah salah satu ajaran dalam agama Hindu yang pada intinya mengajarkan tentang keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Ketiga keseimbangan tersebut merupakan penyebab terjadinya kebahagiaan. Tri Hita Karana bisa dijadikan landasan filosofis dalam pembangunan, baik pembangunan di tingkat daerah maupun pembangunan di tingkat desa (Astuti, 2011: 28). Tri Hita Karana memiliki tiga unsur yaitu *Parhyangan* (mewujudkan hubungan manusia dengan pencipta-Nya yaitu Hyang Widhi Wasa), (2) Pelemahan (mewujudkan hubungan manusia dengan alam lingkungan tempat tinggalnya), dan (3) Pawongan (mewujudkan hubungan antara sesama manusia, sebagai makhluk ciptaan-Nya) (Dharmayuda dalam Hadi, 2011).

Konsep tri hita karana dalam budaya Bali secara nyata telah diterapkan oleh masyarakat Bali khususnya dalam dalam setiap konteks kehidupan budaya masyarakat keseharian, diantaranya adalah adanya silakrama (pertemuan keseharian), upacara pemujaan kepada Tuhan dan juga alam semesta dalam kesehariannya, dimana terbukti dengan ketekunan masyarakat di Bali, masih bisa bertahan sampai saat sekarang ini. Instansi atau pengelola pariwisata akan melakukan segala macam cara untuk mampu bertahan, mengembangkan usahanya ditengah ketatnya persaingan saat ini tanpa memperdulikan dampak yang akan dihasilkan dalam proses ini nantinya. Walaupun terkadang usahanya tergolong tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Timbulnya kesembrawutan, pencemaran alam lingkungan yang disebabkan oleh usahanya, ternodainya kesucian tempat suci dan lainnya merupakan sebuah hasil yang yang membawa dampak ke depan yang tidak menguntungkan bagi semua pihak, dan malah akan membawa kerugian untuk masa depannya. Disinilah Konsep ini memiliki peranan yang sangat vital untuk memberi kesadaran pada semua pengelola , atau orang yang terjun dibidang ini untuk memikirkan bagaimana menjaga keseimbangan antara usaha dengan alam lingkungan sekitarnya sehingga akan tercipta sebuah keharmonisan secara usaha dan budaya yang akan membawa semua bidang berjalan secara stabil. Memang cukup terasa sulit untuk dimengertikan, tetapi konsep Tri Hita Karana akan memberi bimbingan sangat luas kepada insan pariwisata yang secara duniawi dan spiritual akan memberi dampak positif untuk menjaga keharmonisan pariwisata Bali kedepannya. Dengan demikian budaya Bali yang berkonsep Tri Hita Karana akan tetap bisa menjadi contoh yang positif yang memberikan banyak manfaat tidak hanya untuk bidang pariwisata tetapi juga untuk alam dan manusia dengan selalu di landasi rasa syukur ke pada sang

pencipta, Tuhan Yang Maha Esa.

BAB X RENEWABLE ENERGY

Peluang solar sell sebagai *renewble energy*

Energi surya atau matahari telah dimanfaatkan di banyak belahan dunia dan jika dieksplotasi dengan tepat, energi ini berpotensi mampu menyediakan kebutuhan konsumsi energi dunia saat ini dalam waktu yang lebih lama. Matahari dapat digunakan secara langsung untuk memproduksi listrik atau untuk memanaskan bahkan untuk mendinginkan. Potensi masa depan energi surya hanya dibatasi oleh keinginan kita untuk menangkap kesempatan. Ada banyak cara untuk memanfaatkan energi dari matahari. Tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi energi kimia dengan menggunakan fotosintesis. Kita memanfaatkan energi ini dengan memakan dan membakar kayu. Bagaimanapun, istilah “tenaga surya” mempunyai arti mengubah sinar matahari secara langsung menjadi panas atau energi listrik untuk kegunaan kita. Dua tipe dasar tenaga matahari adalah “sinar matahari” dan “photovoltaic” (photo- cahaya, voltaic=tegangan) Photovoltaic tenaga matahari: melibatkan pembangkit listrik dari cahaya. Rahasia dari proses ini adalah penggunaan bahan semi konduktor yang dapat disesuaikan untuk melepas elektron, partikel bermuatan negative yang membentuk dasar listrik. Bahan semi konduktor yang paling umum dipakai dalam sel photovoltaic adalah silikon, sebuah elemen yang umum ditemukan di pasir. Semua sel photovoltaic mempunyai paling tidak dua lapisan semi konduktor seperti itu, satu bermuatan positif dan satu bermuatan negatif.

Ketika cahaya bersinar pada semi konduktor, lading listrik menyeberang sambungan diantara dua lapisan menyebabkan listrik mengalir, membangkitkan arus DC. Makin kuat cahaya, makin kuat aliran listrik. Sistem photovoltaic tidak membutuhkan cahaya matahari yang terang untuk beroperasi. Sistem ini juga membangkitkan listrik di saat hari mendung, dengan energi keluar yang sebanding ke berat jenis awan. Berdasarkan pantulan sinar matahari dari awan, hari-hari mendung dapat menghasilkan angka energi yang lebih tinggi dibandingkan saat langit biru sedang yang benar-benar cerah. Saat ini, sudah menjadi hal umum

piranti kecil, seperti kalkulator, menggunakan solar sel yang sangat kecil. Photovoltaic juga digunakan untuk menyediakan listrik di wilayah yang tidak terdapat jaringan pembangkit tenaga listrik. Kami telah mengembangkan lemari pendingin, yang bernama Solar Chill yang dapat berfungsi dengan energi matahari. Setelah dites, lemari pendingin ini akan digunakan oleh organisasi kemanusiaan untuk membantu menyediakan vaksin di daerah tanpa listrik, dan oleh setiap orang yang tidak ingin bergantung dengan tenaga listrik untuk mendinginkan makanan mereka. Penggunaan sel photovoltaic sebagai desain utama oleh para arsitek semakin meningkat. Sebagai contoh, atap ubin atau slites solar dapat menggantikan bahan atap konvensional. Modul film yang fleksibel bahkan dapat diintegrasikan menjadi atap vaulted, ketika modul semi transparan menyediakan percampuran yang menarik antara bayangan dengan sinar matahari. Sel photovoltaic juga dapat digunakan untuk menyediakan tenaga maksimum ke gedung pada saat hari di musim panas ketika sistem AC membutuhkan energi yang besar, hal itu membantu mengurangi beban maksimum elektrik. Baik dalam skala besar maupun skala kecil photovoltaic dapat mengantarkan tenaga ke jaringan listrik, atau dapat disimpan dalam selnya.

d. Studi Kasus

e. Kesimpulan

f. Daftar Pustaka

BAB XI

Ekowisata

Ekowisata Bali (Tri Ning Tri)

Berbagai kepariwisataan yang terjadi akibat perkembangan pariwisata Bali selama ini lebih cenderung mengarah kepada menguatnya bentuk pariwisata massal (*mass tourism*). Tidak hanya jumlah wisatawan, juga penyediaan infrastuktur pariwisata, perilaku wisatawan, serta aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan di Bali semakin merepresentasi sosok pariwisata massal (Picard, 2006). Faktor kebijakan pemerintah di dalam menempatkan Bali sebagai destinasi pariwisata andalan memainkan peran penting dalam hal ini. Pemerintah sebagai lokomotif penggerak pembangunan kepariwisataan selalu menargetkan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak-banyaknya sebagai cerminan kesuksesan pembangunan pariwisata. Fasilitas akomodasi, baik kategori hotel berbintang dan non-bintang maupun resort-resort mewah yang dimiliki pemodal asing terus dibangun tanpa memperhatikan daya dukung di Bali.

Hal ini tercermin dari makin meningkatnya nilai investasi di sektor pariwisata di Bali. Badan Penanaman Modal Provinsi (BPMP) Provinsi Bali mencatat bahwa dari Rp 7 triliun investasi pada tahun 2010, sebanyak 80 persen di antaranya masuk untuk sektor pariwisata. Data lain menunjukkan bahwa pada tahun 2009 tercatat jumlah kamar hotel bintang sebanyak 18.684 unit ditambah dengan 21.775 unit kamar hotel non-bintang (BPS, 2011). Sementara jumlah kamar hotel di Bali, baik berbintang maupun non-bintang, pada tahun 2010 sudah mencapai 45.557 kamar. Jika diasumsikan rerata luas lahan yang digunakan untuk 1 unit kamar adalah 25 m², maka total luas lahan yang diokupasi kamar hotel mencapai 113,89 hektar (Atmaja, Y., I.B., 2002).

Masifnya pertumbuhan investasi pariwisata tersebut pada tataran realitas terlihat dalam perubahan bentang lahan pulau Bali secara drastis. Daerah pesisir, daerah bantaran sungai, perbukitan, dan pegunungan; bahkan hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air pun tidak lepas dari sasaran lokasi pembangunan fasilitas pariwisata. Perubahan fungsi-fungsi lahan yang sangat pesat, bukan saja menjadi ancaman serius terhadap eksistensi para petani yang sejak lama bergantung pada lahan pertanian sawah, tetapi juga mengakibatkan perubahan struktur pekerjaan yang rentan menciptakan masalah pengangguran (Sutawan, 1997).

Pada konteks pengembangan destinasi pariwisata, berbagai kondisi di atas

sangat potensial mengubah wajah Bali menjadi destinasi pariwisata yang jauh dari nilai-nilai pariwisata budaya. Padahal sejatinya, kehidupan sosial budaya masyarakat, dan pariwisata di Bali merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Komponen sosial budaya masyarakat adalah modal utama dalam pengembangan pariwisata Bali. Di dalam jaringan komponen tersebut, budaya agraris yang terwujud dalam tatanan desa *pakraman* (dulu disebut desa *adat*) dan Subak berfungsi sebagai pilar utama penyangga struktur sosial budaya yang ada. Artinya, faktor kunci keberhasilan pembangunan pariwisata Bali terletak pada keberlangsungan dua pranata tradisional tersebut. Idealnya pengembangan pariwisata Bali semestinya diarahkan agar mampu menciptakan pola hubungan saling menguntungkan (simbiotik-mutualistik) antara elemen-elemen desa *pakraman* dengan industri pariwisata. Dengan demikian pariwisata diharapkan akan menjadi bagian hidup dan mempunyai makna/memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat desa *pakraman* itu sendiri (Timothy dan Boyd, 2003).

Di tengah situasi dan kondisi yang saling bersilang-kelindan di atas, beberapa kalangan di Bali mencoba tetap optimistik dengan mendesain pola-pola pengembangan produk wisata yang dekat dengan prinsip-prinsip pariwisata budaya. Mereka mengembangkan produk wisata berbasis ekowisata di beberapa desa potensial. Walaupun masih berupa rintisan (*pioneer*), eksperimen pengembangan ekowisata tersebut berupaya menerapkan prinsip-prinsip ekowisata sebagai terjemahan dari pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*).

Sejarah perkembangannya, istilah ekowisata mengalami dialektika pendefinisian, dengan tanpa meninggalkan substansinya yang pro-masyarakat lokal (*pro local people*) tersebut. Meskipun istilah ekowisata sudah sering dipergunakan oleh kalangan akademisi, pebisnis wisata, dan NGO, tetapi penggunaan istilah ekowisata masih sering dikacaukan (Galley, G., and Clifton, J., 2004). Salah satunya diberikan oleh Hector Cebalos Lascurain (Lascurain, 1987, dalam Boo, 1991) sebagai “*Traveling to undisturb area or uncontaminated natural areas with a specific objective of studying, admiring and enjoying the scenery and its wild plants and animals*”. Konsep ini dipertegas lagi oleh David Western (1987) yang menyatakan bahwa ekowisata merupakan aktivitas wisata yang bertanggung jawab untuk kelestarian alamnya. Ekowisata harus mampu menciptakan dan memuaskan keinginan alam, dengan cara mengkonservasi, melestarikan ekologi, dan melibatkan peran aktif wisatawan dalam setiap pengembangan serta pembangunan.

Pengertian yang tidak jauh berbeda, *The International Ecotourism Society* (2002), mengkerucutkan pengertian itu dengan mendefinisikan bahwa ekowisata

merupakan suatu bentuk perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Aspek tanggungjawab dan kelestarian ini ditekankan lagi oleh ahli lainnya (Damanik, J. dan Weber, H.F., 2006), dengan meletakkan ekowisata sebagai kegiatan wisata berbasis alam, bersifat berkelanjutan, dikelola secara khusus, berdampak positif terhadap lingkungan, berorientasi pada lokal, tidak bersifat konsumtif, dan fokus pada pengalaman serta pendidikan tentang alam.

Berbagai definisi ekowisata yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa para ahli dan peneliti ekowisata lebih banyak melihat ekowisata dari sudut pandang perjalanan dan pasar (wisatawan). Selanjutnya dari serangkaian pengertian dan prinsip-prinsip ekowisata di atas peneliti dapat merangkum poin-poin penting dari ekowisata untuk melihat fenomena ekowisata di Pulau Bali. Dengan memadukan berbagai definisi yang telah disampaikan para ahli sebelumnya, dalam hal ini definisi ekowisata dari sudut pandang pentingnya aspek produk dan aspek pelibatan masyarakat adalah sebagai berikut:

Ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata di daerah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola dengan kaidah alam, di mana tujuannya selain untuk menikmati keindahan juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi lingkungan, dan pelibatan masyarakat setempat sekitar Daerah Tujuan Ekowisata dalam pengelolaannya.

d. Studi Kasus

e. Kesimpulan

f. Daftar Pustaka

BAB XII

Pergeseran Selera Wisatawan

Trend baru: Serenity, Sustainability, Spirituality

Pada tahun-tahun terakhir ini, terjadi pergeseran tren kepariwisataan, dari motivasi bersenang-senang menjadi mencari pengalaman baru. Paradigma pariwisata pun bergeser dari “sun, sand and sea” menjadi “serenity, sustainability and spirituality”. Berdasarkan penelitian bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini terjadi kenaikan hingga 165% atas perjalanan wisata yang didasarkan

pada keyakinan diri (faith based). UNWTO (2010) memperkirakan sekitar 330 juta wisatawan global atau kurang lebih 30% dari total keseluruhan wisatawan global melakukan kunjungan ke situs-situs religious penting di seluruh dunia, baik didasarkan pada motif spiritual atau pun motif kognitif.

Ada beberapa pergeseran di industri pariwisata, yang menjadikan industri ini kian diminati. Dengan pergeseran-pergeseran industri ini akan semakin menjadi primadona untuk dipacu perkembangannya. Pergeseran pertama adalah mekarnya peluang dari para wisatawan global yang mulai “*go to east*” dimana negara kepulauan Indonesia menjadi pilihan yang menarik (terutama wisata bahari dan kepulauan semisal Raja Ampat). Di samping itu implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah dimulai tentunya turut membuka peluang pasar pariwisata, khususnya *inbound* (wisatawan mancanegara ke dalam negeri).

Kedua, selera pasar juga bergerak ke pariwisata luar negeri. Perlu diingat, kini berwisata ke luar negeri sudah menjadi *mass luxury*. Artinya, bepergian ke luar negeri kini tak lagi merupakan barang mewah. Apalagi bepergian ke negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia. Para pemain seperti *travel agent* sudah melihat dan bergerak cepat untuk menangkap peluang besar dari adanya pergeseran perilaku konsumen ini. Tantangan terbesar bagi para *travel agent* tentu saja adalah mengemas paket-paket *outbound* yang menarik minat wisatawan.

Ada lima besar produk wisata sebagai kontributor kunjungan wisman ke Indonesia sebagaimana terungkap dari hasil survei PES (*passenger exit survey*) 2013 oleh Pusdatin Kemenpar. Ke lima besar tersebut adalah: wisman yang melakukan wisata belanja dan kuliner (80%), wisata religi dan *heritage* (80%), wisata bahari (35%), wisata MICE: meeting, incentives, conference, and exhibition (25%), dan wisata olah raga (5%). Lima jenis wisata inilah yang seharusnya menjadi fokus pengembangan pariwisata *inbound* penghasil devisa. Wisata MICE misalnya, potensinya luar biasa besar, namun hingga detik ini perhatian dari pemerintah masih minim.

Ketiga, selera pasar konsumen pariwisata kini sebagian besar sudah diinduksi oleh informasi digital melalui internet berupa *travel blog* atau situs perbandingan harga antar penyedia layanan pariwisata. Dukungan dari pengguna internet, khususnya pengguna media sosial sudah sangat massif dalam menggeliatkan industri pariwisata nasional. Tanpa diminta, mereka meramaikan jagat internet dengan konten digital seputar *travelling* baik pra, saat, dan pasca liburan.

Keempat, pergeseran selera yang datang dari kelas menengah Indonesia yang memosisikan liburan sebagai “*basic needs*”. Dengan daya beli yang semakin tinggi, kelas menengah merasa bahwa liburan telah menjadi suatu kebutuhan baru yang wajib dilaksanakan setiap tiga bulan, setengah tahun, atau paling tidak

setahun sekali. Adanya *travel review* di platform blog atau media sosial, memudahkan *middle class* untuk mencari informasi yang diinginkan. Beberapa blog yang dimiliki *blogger* pecinta *travelling* kerap ramai dikunjungi oleh kelas menengah. Kebutuhan liburan yang meningkat ini juga didorong oleh biaya transportasi dan akomodasi terjangkau dengan munculnya *budget airlines* dan *budget hotel*.

Pergeseran terakhir adalah meluasnya cakupan wisata. Wisata kini tidak lagi sebatas hanya pergi ke gunung atau pantai. Wisata kini sudah mengalami sofistikasi dan menjelma menjadi beragam bentuk. Ada wisata yang berurusan dengan isi-mengisi perut alias wisata kuliner. Ada wisata yang terkait ibadah atau kita sering menyebutnya wisata religi. Ada wisata yang terkait dengan berobat: contohnya *health check-up* di Singapura, habis itu jalan-jalan. Ada wisata nonton konser. Juga ada wisata olah raga seperti nonton Liverpool di Stadion Anfield.

Menyongsong pergeseran-pergeseran perilaku konsumen positif yang bakal mendorong kemajuan industri pariwisata di atas, kita harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih terbengkelai. Pengembangan Infrastruktur merupakan tantangan di depan mata. Contoh, sehebat apapun Raja Ampat, kalau bandara, pelabuhan, atau hotel-restaurannya compang-camping, maka kehebatan itu akan pupus tak ada artinya. Integrasi dan kolaborasi seluruh *stakeholder* pariwisata juga menjadi agenda mendesak untuk segera direalisasikan. Maskapai penerbangan, *travel agent*, hotel-restoran, pelaku MICE, pengelola bandara-pelabuhan, dan lain-lain harus selaras-sejalan (dengan diorkestrasi oleh pemerintah) saling berkolaborasi untuk mewujudkan wisata Indonesia yang kompetitif di tingkat global. Dalam konteksnya ini rasanya ide Indonesia Incorporated (Indonesia Inc.) di sektor pariwisata menjadi relevan untuk diwujudkan.

IT dan Pariwisata

Meski daya beli konsumen Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih menunjukkan penurunan lantaran kondisi ekonomi masih belum membaik, namun perjalanan wisata ke luar negeri dari Indonesia justru meningkat 33%. Demikian data yang dirilis Visa Global Travel Intention Survey 2015. Bahkan, rata-rata anggaran perjalanan wisatawan Indonesia meningkat sebesar 30% dari tahun 2013-2015. Terbukti, pengeluaran untuk wisata meningkat dari US\$ 28,9 miliar pada tahun 2010 menjadi US\$ 37,7 miliar pada tahun 2014 (www.wttc.org).

Fakta lain yang menarik untuk dicermati adalah segmen wisatawan yang lahir tahun 80 dan 90-an, atau biasa disebut wisatawan Millennial. Ternyata, karakter dari

wisatawan millennial adalah gemar mencari pengalaman yang lebih baru, termasuk wisata petualangan, eksplorasi ke kutub, dan perjalanan darat (road trips). Para wisatawan Millennial mengaku bahwa pilihan mereka mencari pengalaman wisata yang unik, baru, otentik dan personal adalah untuk membuat mereka berbeda dengan rekan-rekannya.

Merujuk data Singapore Tourism Board baru-baru ini, 31% wisatawan Millennial Indonesia cenderung mengambil liburan secara mendadak. Sementara, hanya 19% rata-rata wisatawan Millennial Asia cenderung mengambil liburan secara mendadak. Wisatawan Millennial Indonesia juga sering terpengaruh oleh pengalaman orang lain. Hal itu terjadi di seluruh jaringan sosial baik offline ataupun online. Begitu juga forum-forum online dan situs-situs review. Masih menurut hasil studi Singapore Tourism Board, wisatawan Millennial Indonesia mengandalkan informasi dari mulut ke mulut mengenai tujuan wisata mereka. Selanjutnya, wisatawan tersebut berbagi pengalaman wisatanya melalui media sosial mereka.

BAB XIII

PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT

Mengenal konsep PBM

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan sejenis kepariwisataan yang perkembangan dan pengelolaannya dikontrol oleh masyarakat lokal, dimana bagian terbesar dari manfaat yang dihasilkan kepariwisataan tersebut dinikmati oleh masyarakat lokal baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kepariwisataan tersebut. Pariwisata berbasis masyarakat memiliki beberapa karakteristik yaitu adanya pendidikan dan interpretasi sebagai bagian dari produk wisatanya, meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan pengunjung terhadap pentingnya upaya konservasi, umumnya diperuntukkan bagi wisatawan dalam jumlah kecil oleh usaha jasa yang dimiliki masyarakat lokal, meminimalisir dampak negatif terhadap alam dan lingkungan sosial-budaya dan mendukung upaya perlindungan terhadap alam. (Hausler dan Strasdas, 2002).

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan prinsip-prinsip dari konsep pariwisata berbasis masyarakat (CBT) yaitu prinsip partisipasi masyarakat, prinsip pendidikan (edukasi), prinsip konservasi alam, prinsip konservasi budaya, dan prinsip ekonomi local.

Jika diimplementasikan dengan baik, pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan manfaat ekonomi yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui keuntungan usaha dan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, memulihkan kondisi ekonomi dan memperbaiki infrastruktur. Pariwisata berbasis masyarakat bahkan mendukung efektifitas ekonomi lain baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata. Selain itu, pariwisata berbasis masyarakat dapat membangun jejaring antara sektor yang terkait dan menciptakan pasar untuk produk wisata yang telah disiapkan, berkontribusi untuk menyeimbangkan pembangunan, menyediakan keragaman ekonomi, menghapus ketergantungan ekonomi terhadap sektor tertentu, meratakan distribusi kesempatan kerja dan kesempatan memperoleh penghasilan.

Di bidang sosial-budaya, pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan kualitas SDM lokal melalui program pelatihan dan pendidikan, mendukung organisasi masyarakat lokal dalam hal meningkatkan kapasitas, membangun jejaring dan keterlibatan mereka dalam pengembangan pariwisata di daerahnya dan memungkinkan terciptanya tata kelola kepariwisataan yang baik melalui keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan di segala tingkatan. Pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, meningkatkan kebanggaan mereka terhadap daerah dan budayanya, meningkatkan kerukunan, memberdayakan masyarakat dan menciptakan persamaan sosial, mengurangi emigrasi dan memicu imigrasi. Pariwisata berbasis masyarakat juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, meningkatkan tingkat kesehatan melalui perbaikan sanitasi dan sistem pengelolaan limbah, fasilitas umum dan infrastruktur (air, listrik dan telekomunikasi), menjaga dan mempromosikan budaya lokal, tempat bersejarah, dan alam melalui peningkatan kesadaran masyarakat lokal terhadap pentingnya konservasi serta menyediakan dukungan dana yang dihasilkan dari keberadaan kepariwisataan di suatu daerah. Pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan hubungan dan jejaring antar budaya melalui pertukaran budaya dan dialog antara masyarakat lokal dan wisatawan.

Manfaat pariwisata berbasis masyarakat terhadap lingkungan adalah dapat mendorong pemanfaatan berkelanjutan dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang sensitif, menghindari eksploitasi dan ketergantungan terhadap satu sumber daya, mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara tidak konsumtif, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan di tingkat nasional dan lokal, serta meningkatkan pemahaman terhadap hubungan antara lingkungan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (Tasci et al, 2013).

Desa Wisata dan Pelibatan Masyarakat Lokal

Menurut Wiendu (1993), desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata biasanya memiliki kecenderungan kawasan pedesaan yang memiliki kekhasan dan daya tarik sebagai tujuan wisata.

Tipe Desa Wisata

Menurut pola, proses, dan tipe pengelolanya desa atau kampung wisata terbagi dalam dua bentuk yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka (Wiendu,1993).

1. Tipe Terstruktur

Tipe terstruktur ditandai dengan karakter sebagai berikut:

- a. Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Kelebihan tipe ini adalah dalam citra yang ditumbuhkan mampu menembus pasar internasional.
- b. Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat lokal sehingga dampak negatif yang ditimbulkan diharapkan terkontrol dan pencemaran sosial budaya akan terdeteksi sejak dini.
- c. Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinir sehingga diharapkan menjadi agen untuk mendapatkan dana internasional sebagai unsur utama menangkap jasa dari hotel-hotel berbintang.

2. Tipe Terbuka

Tipe ini ditandai dengan karakter tumbuh dan menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal, akan tetapi dampak negatifnya cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal sehingga sulit dikendalikan.

Syarat Untuk Menjadi Desa Wisata

Suatu kawasan dikatakan dapat menjadi desa wisata harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut (Syamsu dalam Prakoso, 2008):

- a. Faktor kelangkaan adalah sifat dari atraksi wisata yang tidak bias dijumpai

atau langka di tempat lain.

- b. Faktor kealamiahannya adalah sifat atraksi wisata yang belum pernah mengalami perubahan akibat campur tangan manusia.
- c. Keunikan, yakni sifat atraksi wisata yang memiliki keunggulan komparatif dibanding objek wisata lain.
- d. Faktor pemberdayaan masyarakat yang mampu menghimbau agar masyarakat ikut serta dan diberdayakan dalam pengelolaan objek wisata di daerahnya.

Desa wisata dilihat sebagai bentuk industri pariwisata yang berupa kegiatan mengaktualisasikan perjalanan wisata identik meliputi sejumlah kegiatan yang bersifat menghimbau, merayu, mendorong wisatawan sebagai konsumen agar menggunakan produk dari desa wisata tersebut atau mengadakan perjalanan wisata ke desa wisata tersebut atau disebut pemasaran desa wisata. Komponen produk pariwisata itu sendiri terdiri atas angkutan wisata, atraksi wisata, dan akomodasi pariwisata (Soekadijo, 2000).

Menurut Suswantoro (2007) pada hakekatnya pengertian produk wisata adalah keseluruhan pelayanan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati oleh wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan wisata hingga kembali kerumah dimana ia berangkat semula. Sedangkan Bukart dan Medlik (dalam Yoeti, 1996:151) mendeskripsikan produk wisata sebagai susunan produk yang terpadu, yang terdiri dari obyek wisata, atraksi wisata, transportasi (jasa angkutan), akomodasi dan hiburan di mana tiap unsur dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah.

Produk wisata yang ditawarkan dan beroperasi pada ekonomi pasar. Kondisi itu memungkinkan desa wisata tersebut ditinggalkan oleh wisatawan karena perubahan kondisi demand dan supply yang berkembang di pasar global. Dimana setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri (Jhingan, 1990). Tiap terjadi produksi produk akan ada pendapatan yang besar sama dengan nilai produksi sehingga dalam keseimbangan, peningkatan produksi akan selalu diiringi peningkatan pendapatan dan akhirnya diiringi juga oleh peningkatan permintaan. Kondisi ini mengharuskan desa wisata mampu memberikan deferensiasi produk yang beranekaragam dan tanggap terhadap perubahan kondisi pasar.

d. Studi Kasus

e. Kesimpulan

f. Daftar Pustaka

BAB XIV

SAMPAH DAN PARIWISATA

Permasalahan sampah bukan hanya berdampak pada persoalan lingkungan, tetapi juga telah menimbulkan kerawanan sosial dan bencana kemanusiaan.

Pengertian Sampah

Istilah sampah pasti sudah tidak asing lagi ditelinga. Jika mendengar istilah sampah, pasti yang terlintas dalam benak adalah setumpuk limbah yang menimbulkan aroma bau busuk yang sangat menyengat.

Dalam kehidupan sehari-hari sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah adalah zat kimia, energi atau makhluk hidup yang tidak mempunyai nilai guna dan cenderung merusak dan biasa disebut sebagai benda yang telah habis masa manfaatnya.

Macam-macam Sampah

Dari segi proses dan sifat penguraiannya sampah ada 2 macam, yaitu

1. Sampah organik (*degradable*)

Sampah organik adalah sampah yang mudah diuraikan oleh tanah, misalnya: daun-daunan, sekam padi, kertas, sampah dapur, dan lain-lain.

2. Sampah anorganik (*undegradable*)

Sampah anorganik adalah sampah yang sulit diuraikan oleh tanah, misalnya: plastik, kaleng, botol, kaca, besi, dan lain-lain

Sedangkan berdasarkan sumbernya sampah terbagi menjadi sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan sampah pertambangan.

Dampak Negatif Sampah Bagi Lingkungan

Sampah dapat berada pada setiap fase materi yaitu fase padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yaitu cair dan gas, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Bila sampah masuk ke dalam lingkungan (ke air, ke udara dan ke tanah) maka kualitas lingkungan akan menurun. Peristiwa masuknya sampah ke lingkungan inilah yang dikenal sebagai peristiwa pencemaran lingkungan (Pasyimi).

Cara Mengatasi Masalah Sampah di Indonesia

Diantara sampah organik dan anorganik yang paling berbahaya dan dapat merusak lingkungan adalah sampah anorganik karena sampah anorganik membutuhkan waktu yang lama agar molekul-molekulnya dapat terurai dalam tanah. Sebaliknya, sampah organik seperti daun-daunan dapat menyuburkan tanah karena daun-daunan dapat berubah menjadi kompos.

Ada empat prinsip yang dapat digunakan dalam menangani masalah sampah ini. Ke empat prinsip tersebut lebih dikenal dengan nama 4R yang meliputi:

1. *Reduce* (Mengurangi); sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang kita gunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.
2. *Reuse* (Memakai kembali); sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable (sekali pakai, buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.
3. *Recycle* (Mendaur ulang); sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.
4. *Replace* (Mengganti); teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Juga telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya, ganti kantong keresek kita dengan keranjang bila berbelanja, dan jangan gunakan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami. Salah satu solusi mengatasi sampah adalah dilakukannya proses daur ulang, sehingga sampah tersebut dapat bermanfaat kembali dan dapat memberikan nilai ekonomis yang cukup tinggi.

d. Studi Kasus

e. Kesimpulan

f. Daftar Pustaka

BAB XV

TRICKLE DOWN EFFECT PARIWISATA

Manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat kecil

Berbagai diskursus mengenai kebijakan *trickle down effect* seakan menjurus pada sebuah stigma negatif yang diamini secara bersama-sama. Setiap topik atau bahasan mengenai prinsip *trickle down effect* mesti berujung pada sikap penghakiman yang berat sebelah. Pengusung kebijakan ini boleh jadi akan menjadi sasaran empuk para penganut paham *post development* untuk dihakimi secara membabi buta. Segala ungkapan bernuansa celaan semisal pro status quo hingga anti rakyat menjadi santapan sehari-hari. Perlakuan ini mungkin sebuah justifikasi yang cukup rasional mengingat sejarah telah bercerita mengenai gagalnya kebijakan ini dalam mengangkat kesejahteraan rakyat banyak, sebab alih-alih meratakan pendapatan yang terjadi justru penumpukan modal pada satu kelompok elit yang biasa kita kenal sebagai para konglomerat. Sehingga tidaklah salah jika kemudian kebijakan *trickle down effect* ini lebih dikenal sebagai kebijakan konglomerasi. Ungkapan ini kemudian lebih sering diposisikan sebagai istilah politis yang bernuansa retorik. Upaya penggiringan opini menjadi sesuatu yang sah selama hal itu ditunjang oleh bukti yang sah. Adalah upaya penyesatan jika usaha untuk menggiring publik lebih didasari pada emosi yang membunyah.

Dampak Pariwisata terhadap Perekonomian Wilayah

Dampak Pariwisata Terhadap Perekonomian Industri pariwisata menghasilkan manfaat ekonomi yang besar baik bagi Negara tuan rumah, maupun Negara asal

para turis. Salah satu motivasi utama sebuah Negara mempromosikan dirinya sebagai Negara dengan tujuan wisata adalah timbul kemajuan dalam ekonomi, terutama bagi Negara-negara berkembang. Bersamaan dengan dampak lainnya, peningkatan ekonomi yang begitu pesat juga terjadi dengan berbagai keuntungan dan kerugian. Dampak besar pariwisata terlihat dari data World Tourism Organization, pada tahun 2000, 698 juta orang melakukan perjalanan ke luar negeri dan menghabiskan lebih dari 478 juta US dollar. Gabungan dari pendapatan pariwisata internasional dengan pendapatan transportasi maka menghasilkan lebih dari 575 juta US dollar, yang membuat pariwisata menjadi penghasil ekspor terbesar di dunia diikuti oleh produk otomotif, bahan kimia, minyak bumi, dan makanan. Namun, banyak kerugian tersembunyi dari pariwisata yaitu, adanya dampakdampak pada ekonomi yang tidak diharapkan oleh penduduk setempat. Seringkali keuntungan pariwisata sebuah Negara maju lebih tinggi dari Negara berkembang. Padahal Negara berkembang lebih membutuhkan pendapatan tambahan, pekerjaan, dan peningkatan standar hidup lewat pariwisata. Berdasarkan kenyataan tersebut, berbagai alasan muncul antara lain, karena adanya transfer besar-besaran pendapatan pariwisata dari Negara tuan rumah, kemudian kurang diperhatikannya bisnis dan produk dalam negeri.

Dampak Positifnya

1. Membuka lapangan kerja bagi penduduk lokal di bidang pariwisata seperti : tour guide, waiter, bell boy, dan lain-lain.
2. Dibangunnya fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik demi kenyamanan para wisatawan yang juga secara langsung dan tidak langsung bisa dipergunakan oleh penduduk lokal pula. Seperti : tempat rekreasi, mall, dan lain-lain.
3. Mendapatkan devisa (national balance payment) melalui pertukaran mata uang asing (foreign exchange).
4. Mendorong seseorang untuk berwiraswasta / wirausaha, contoh : pedagang kerajinan, penyewaan papan selancar, pemasok bahan makanan dan bunga ke hotel,dan lain-lain.
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga pendapatan pemerintah.
6. Memberikan keuntungan ekonomi kepada hotel dan restaurant. Contohnya, wisatawan yang pergi berwisata bersama keluarganya memerlukan kamar yang besar dan makanan yang lebih banyak. Dampak ekonomi tidak langsung dapat dirasakan oleh pedagang-pedagang di pasar karena permintaan terhadap barang/bahan makanan akan bertambah.

Dampak negatifnya

1. Bahaya ketergantungan yang sangat mendalam terhadap pariwisata.
2. Meningkatkan inflasi dan harga jual tanah menjadi mahal.
3. Meningkatkan impor barang dari luar negeri, terutama alat-alat teknologi modern yang digunakan untuk memberikan pelayanan bermutu pada wisatawan dan juga biaya-biaya pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang ada.
4. Produksi yang bersifat musiman menyebabkan rendahnya tingkat pengembalian modal awal
5. Terjadi ketimpangan daerah dan memburuknya kesenjangan pendapatan antara beberapa kelompok masyarakat.
6. Hilangnya kontrol masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi.

Naisbitt dalam “Global Paradox” menjelaskan bahwa pariwisata merupakan penyumbang bagi ekonomi global yang tidak ada tandingannya di masa yang akan datang. Adapun pertimbangannya adalah:

1. Pariwisata memperkerjakan 204 juta orang diseluruh dunia atau satu dari setiap Sembilan pekerja, yaitu 10,6 persen dari angkatan kerja.
2. pariwisata adalah penyumbangan ekonomi terkemuka di dunia, yang menghasilkan 10,2 persen produk domestic bruto dunia .
3. pariwisata adalah produsen terkemuka untuk mendapatkan pajak sebesar \$ 55 miliar.

Global ekonomi dan perluasan pasar dunia merupakan dua fenomena yang keberadaannya menyejarah. Pada saat ini globalisasi ekonomi dan perluasan pasar memiliki kekuatan, cakupan dan kecepatan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Secara konkrit globalisasi ekonomi ditandai dengan perubahan mode of production masyarakat, yaitu dari subsistensi ke orientasi pasar-pasar regional, seperti APEC, NAFTA, AFTA dsb. Secara kelembagaan menjelma dalam percepatan komersial. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya perubahan sosial, seperti merebaknya tindakan individu yang lebih didasarkan pada rasionalitas ekonomi (Heru Nugroho, 1996).

Akibatnya terjadi akselerasi tindakan komersial di segala penjuru masyarakat capital dengan leluasa dapat bergerak tanpa memiliki “bendera: dan menembus setiap batas teritori Negara. Investasi modal yang dilakukan oleh perusahaan transnasional tumbuh dan berkembang melanda setiap penjuru dunia sehingga membentuk konfigurasi perekonomian global. Didorong oleh motif mengejar keuntungan global. Didorong oleh motif mengejar keuntungan global maka telah tumbuh tiga kawasan megamarket dunia (Heru Nugroho, 1996). Yaitu Uni Eropa, Amerika utara dan Asia Timur dan Tenggara. Pertumbuhan ekonomi dunia dipengaruhinya life style terutama dalam memanfaatkan waktu luang sehingga wajar kalau frekuensi mobilitas penduduk dunia tinggi.

- d. Studi Kasus
- e. Kesimpulan
- f. Daftar Pustaka

BAB XVI

PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN GREEN MAP

Lingkungan sebagai *resources* penunjang Pariwisata

Industri pariwisata (tourism) merupakan salah satu isu utama di millenium ketiga ini selain transportasi, telekomunikasi, dan teknologi (4T). Ini berarti, pariwisata menjadi salah satu industri yang tumbuh dominan dan memiliki peran penting dalam aspek kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Beberapa waktu lalu dalam dunia pariwisata muncul isu mengenai Greenspeak dan Go Green.

Kedua isu ini berkaitan erat dengan wisata yang berbasis pemeliharaan dan pelestarian alam. Lingkungan alam dijadikan basis pengembangan hampir keseluruhan industri, dan pariwisata merupakan salah satu industri yang tidak luput dari tuntunan aplikasi pengembangan industri berwawasan pemeliharaan alam (konservasi) yang sustainable way (berkelanjutan). Peran utama pariwisata sebagai katalisator perubahan dimulai ketika disadari bahwa masyarakat dunia mengeluarkan biaya untuk mengadakan perjalanan 'travel' ke tempat tujuannya (lebih dari 25 mil dari tempat tinggalnya) melebihi US\$ 2 trilyun di tahun 1986, sedangkan anggaran Militer dunia hanya mengeluarkan biaya tidak lebih dari US\$ 1 trilyun sampai tahun 1987.

Pariwisata menyumbang lebih dari 10 persen dari total GNP (Gross National Product) dunia dan secara langsung maupun tak langsung menampung sekitar 200 juta pekerja baru. Secara global maupun dalam skala nasional, pariwisata merupakan sektor ekonomi penting yang bertumbuh cepat sampai hari ini dan menjadi kontributor GDP (Gross Domestic Product) dari berbagai negara terutama di negara berkembang yang memiliki pulau tropis. Seperti halnya di Karibia, 30-50

persen dari total pendapatannya bersumber dari pariwisata. WTO (2002) mengestimasi pendapatan dari sektor ini sekitar 25 persen dari total ekspor dari negara-negara sekitar Pasifik (Pasific Rim) dan lebih dari 35 persen khusus untuk kepulauan Karibia.

Tidaklah sulit mengamati bagaimana daerah yang memiliki pulau tropis merupakan tujuan utama wisata dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia setelah Kanada plus merupakan pusat keanekaragaman flora dan fauna dunia (Hotspot Sundaland, Wallacea, Tropical Wildernes Papua dan Heart of Coral Triangle). Pariwisata di wilayah pesisir dan laut bersumber pada nilai keanekaragaman hayati, karena semakin tinggi 'keanekaragaman' maka semakin tinggi daya jualnya. Keunikan dan keindahan lingkungan alam tropis ini merupakan sumberdaya potensial penting yang kita miliki dibanding daerah dan negara lain. Tidak mengherankan obyek pengembangan pariwisata telah bertumpu pada lingkungan ekosistem pesisir dan laut seperti aktifitas rekreasi Skin/SCUBA diving, Kayaking, dsb.

'SUSTAINABLE WAY'

Industri pariwisata umumnya didasarkan atas ketersediaan sumberdaya alam seperti udara, daratan dan air. Sumberdaya alam tersebut dijadikan obyek sekaligus produk bagi industri pariwisata. Ekosistem alam akan rusak jika perencanaan, pengembangan dan pengoperasiannya tidak diatur dengan pantas. Di lain pihak jika dikembangkan secara berkelanjutan, pariwisata dapat menjadi kekuatan positif bagi konservasi lingkungan.

Satu diantara sekian karakter dari pariwisata adalah bahwa pariwisata sangat tergantung pada kebersihan atau lingkungan yang asli dan alami. Hal ini mengarah pada argumen bahwa pariwisata, karena itu, harus membenahi diri secara alami dengan konsep pembangunan berkelanjutan ('mass' ke 'soft tourism'). Semenjak hal tersebut digaungkan dan dipromosikan untuk memproteksi dan melestarikan lingkungan, maka suksesnya pembangunan berkelanjutan khususnya pariwisata sangatlah bergantung pada kualitas lingkungan. Meskipun terdapat beberapa kategori pariwisata yang kurang hubungannya dengan lingkungan, tapi secara umum kenyamanan berwisata tetap tergantung pada lingkungan yang bersih baik di pemukiman maupun di pusat kota. Pada saat turis berada di tempat tujuannya, mereka akan terusik dan terganggu jika terlihat sampah dimana-mana, kesemrawutan, udara yang kotor/berasap mengiringi perjalanannya serta tidak tersedianya sarana pendukung yang layak.

Dari tinjauan ekologis, hal inipun secara langsung maupun tidak langsung berhubungan erat dengan keberadaan lingkungan. Satu yang tak dapat dipungkiri

bahwa pariwisata seperti berwisata di wilayah pesisir dan pulau memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan dan kebersihan air laut. Yang pasti banyak hotel dan resort walaupun setidak-tidaknya telah mengklaim lokasinya dengan keberadaan lingkungan yang alami. Faktor-faktor lingkungan yang umum seperti keberadaan pantai dan matahari tropis yang hangat dapat menarik turis. Turis tak akan datang kembali jika daerah tujuan tersebut telah tercemar, kotor dan tidak menarik lagi. Hal yang ingin ditekankan disini, bahwa pariwisata sangat bergantung dan membutuhkan lingkungan yang bersih, alami dan asli sesuai keinginan turis. Hal ini juga tentunya seiring dengan keinginan kita masyarakat yang menghendaki adanya kebersihan, ketertiban dan keharmonisan dengan lingkungan.

Wisatawan tidak hanya tertarik pada perspektif mengenai keanekaragaman dan keunikan biota, namun yang lebih penting bagaimana proses dan hasil dari lingkungan alam serta kaitannya dengan manusia yang mendiami dan menggunakan lingkungannya. Keteraturan, kebersihan kota dan lingkungannya merupakan cermin dari masyarakat/manusia yang mendiaminya. Hal ini akan berdampak pada keberlangsungan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir yang menunjang keseimbangan sistem ekologis. Kombinasi dari hal tersebut juga tentunya akan menguntungkan bagi keberlangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Pariwisata dinilai merupakan industri yang tak berasap dan tidak memiliki produk, namun tak dapat dihindari fakta dimana pembangunan hotel, marina, mall dan pengoperasian fasilitas wisata secara mendasar merubah lingkungan dan komunitasnya. Semenjak awal tahun 1970-an pembangunan berkelanjutan telah menjadi kesatuan konsep untuk perencanaan lingkungan. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya masih kurang dipahami. Konsep tersebut menjembatani hubungan antara konservasi lingkungan dan kualitas hidup sosial-ekonomi tetapi tetap meninggalkan isu perdebatan mengenai bagaimana keseimbangan pemanfaatan yang berkelanjutan atau bagaimana nilai suatu lingkungan.

Berbagai organisasi dunia menyangkut pariwisata dan lingkungan menyepakati bahwa pariwisata hendaknya merangkul prinsip-prinsip berkelanjutan dengan menghargai daya dukung lingkungan (carrying capacity), tanggungjawab sosial dan kesatuan aktifitas pariwisata dengan keinginan penduduk lokal. Tourism Concern (TC) dan Worlwide Fund for Nature (WWF) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan adalah sebagai pariwisata dan infrastrukturnya yang :

- Beroperasi dengan kapasitas alami untuk regenerasi dan masa depan produktifitas alam, sosial dan budaya;
- Mengakui kontribusi dimana masyarakat dan komunitas, kebiasaan dan gaya hidup sekarang dan yang akan datang menjadi pengalaman bagi pariwisata;

- Menerima bahwa masyarakat memiliki pembagian yang adil dan wajar dari keuntungan pariwisata;
- Diarahkan dari yang 'berkepentingan' kepada masyarakat dan komunitas di sekitar wilayah wisata khususnya.

Dengan usaha yang berkelanjutan diharapkan nantinya aktifitas pariwisata menjadi alat informasi pengetahuan, mendukung kesatuan ekosistem, memberi keuntungan bagi penduduk, memelihara lingkungan dan menghormati budaya serta tradisi lokal.. Ukuran suksesnya pariwisata bukan hanya jumlah pengunjung belaka (kuantitas) tetapi oleh lamanya tinggal, uang yang dipakai selama kunjungan dan kualitas pengalaman. Pada akhirnya dicapai kepuasan, memberi gairah kepada turis dengan membawa pengetahuan baru di tempat asalnya dan membagi cerita kepada teman-temannya apa yang diperolehnya. Hal ini tentunya akan menarik pengunjung baru dan akan tetap memberi peluang bagi kelanjutan bisnis pariwisata terus menerus.

Prinsip dari pengembangan pariwisata berkelanjutan dinyatakan dengan penggunaan secara optimal sumberdaya alam dan budaya dalam kerangka keseimbangan dan menyokong pengembangan perekonomian nasional secara keseluruhan. Menyediakan kesan khusus bagi turis di satu sisi, dan disisi lain meningkatkan kualitas kehidupan penduduk lokal. Ini bisa dicapai hanya dengan kerjasama permanen antara pemerintah, sektor swasta dan penduduk lokal. Pariwisata berkelanjutan adalah industri yang diusahakan menekan dampak negatif pada lingkungan dan budaya lokal, dengan membantu meningkatkan pendapatan, pekerjaan, dan konservasi ekosistem setempat. Hal ini merupakan pariwisata bertanggungjawab yang sensitif terhadap nilai-nilai ekologi dan budaya seperti 'ecotourism'.

Green Map

Green Map adalah peta yang dibuat oleh komunitas lokal yang memetakan potensi alam dan budaya suatu kawasan. Dengan menggunakan metode yang mudah diadaptasi serta konsep ikon Green Map sebagai bahasa visual global untuk menyoroti sumberdaya-sumberdaya kehidupan, Green Map mengelola partisipasi masyarakat lokal dan keberlanjutannya di ratusan tempat di seluruh dunia. Green Map memetakan segala tempat dan fenomena, baik yang bernilai positif maupun negatif dan bertujuan untuk membantu masyarakat melihat, menilai, menghubungkan, serta peduli terhadap lingkungan tempat mereka berada.

Peta Hijau (*Green Map*) adalah peta tematik yang menampilkan keterkaitan antara masyarakat dengan lingkungan. Sistem peta hijau adalah kerja sama global yang memungkinkan masyarakat di mana pun untuk membuat peta hijau yang

bersifat lokal.

Tujuan pembuatan peta hijau :

1. Menciptakan cara pandang baru bagi warga kota untuk menemukan cara yang berbeda menikmati hidup di perkotaan.
2. Memandu wisatawan-terutama yang suka berpetualang – ke tempat-tempat istimewa bernuansa hijau yang dapat mereka rasakan sehingga mereka ingin menirunya di tempat tinggal mereka sendiri.
3. Sebagai sarana untuk menumbuhkan budaya tertib.
4. Membantu warga dan pendatang dalam menjelajahi dan mengenali suatu kota.
5. Menunjukkan kepada masyarakat tempat-tempat untuk berperilaku sosial yang bertanggung jawab, pilihan harian yang berkelanjutan, kaya secara budaya, sadar ekologi, dan hubungan yang lebih kuat dengan beragam komunitas di seluruh dunia.

Ikon-ikon Peta Hijau

Peta hijau menandai potensi alam dan budaya suatu kawasan. Penandaan atau pemetaan dilakukan dengan penggunaan bahasa komunikasi visual sistem ikon *Green Map*.

Sistem ikon *Green Map* didesain bersama untuk mengidentifikasi suatu daerah dan fenomena yang memiliki potensi sumber daya alam dan kebudayaan di setiap peta hijau yang diterbitkan, baik yang bersifat positif dan negatif. Ikon ini merupakan sebuah metode komunikasi dengan cara yang berbeda kepada masyarakat umum. Definisi setiap ikon telah ditentukan sebelumnya, tetapi pemeta lokal mendapat izin untuk mendefinisikan secara tepat dan membuat [ikon lokal] baru yang relevan dengan situasi dan kondisi yang terdapat di lapangan. Ikon *Green Map* tidak hanya dibentuk dalam gambar, melainkan juga didigitalisasi menjadi sebuah tulisan, sehingga dapat digunakan dalam berbagai jenis perangkat lunak yang ada pada komputer.

b. Metode Green Map

a. RRA/ PRA

RRA (*Rapid Rural Appraisal*)

RRA (*Rapid Rural Appraisal*) merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dalam praktek, kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh “orang luar” dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Meskipun sering dikatakan sebagai teknik penelitian yang “*cepat dan kasar/kotor*” tetapi RRA dinilai

masih lebih baik dibanding teknik-teknik kuantitatif klasik. Metode RRA digunakan untuk pengumpulan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas ketika keputusan tentang pembangunan perdesaan harus diambil segera. Dewasa ini banyak program pembangunan yang dilaksanakan sebelum adanya kegiatan pengumpulan semua informasi di daerah sasaran. Konsekuensinya, banyak program pembangunan yang gagal atau tidak dapat diterima oleh kelompok sasaran meskipun program-program tersebut sudah direncanakan dan dipersiapkan secara matang, karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam penyusunan prioritas dan pemecahan masalahnya.

Pada dasarnya, metode RRA merupakan proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi perdesaan, dilakukan berulang-ulang, dan cepat. Untuk itu diperlukan cara kerja yang khas, seperti tim kerja kecil yang bersifat multidisiplin, menggunakan sejumlah metode, cara, dan pemilihan teknik yang khusus, untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap kondisi perdesaan. Cara kerja tersebut tersebut dipusatkan pada pemahaman pada tingkat komunitas lokal yang digabungkan dengan pengetahuan ilmiah.

Komunikasi dan kerjasama diantara masyarakat desa dan aparat perencana dan pelaksana pembangunan (*development agent*) adalah sangat penting, dalam kerangka untuk memahami masalah-masalah di perdesaan. Di samping itu, metoda RRA juga berguna dalam memonitor kecenderungan perubahan-perubahan di perdesaan untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi di lapangan dan mengusulkan penyelesaian masalah yang memungkinkan. Menurut Beebe James (1995), metode RRA menyajikan pengamatan yang dipercepat yang dilakukan oleh dua atau lebih pengamat atau peneliti, biasanya dengan latar belakang akademis yang berbeda. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pengamatan kualitatif bagi keperluan pembuat keputusan untuk menentukan perlu tidaknya penelitian tambahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan.

Metode RRA memiliki tiga konsep dasar yaitu; (a) perspektif sistem, (b) triangulasi dari pengumpulan data, dan (c) pengumpulan data dan analisis secara berulang-ulang (*iterative*).

Sebagai suatu teknik penilaian, RRA menggabungkan beberapa teknik yang terdiri dari:

- a. Review/telaahan data sekunder, termasuk peta wilayah dan pengamatan lapang secara ringkas.
- b. Oservasi/pengamatan lapang secara langsung.
- c. Wawancara dengan informan kunci dan lokakarya.
- d. Pemetaan dan pembuatan diagram/grafik.
- e. Studi kasus, sejarah lokal, dan biografi.
- f. Kecenderungan-kecenderungan.

- g. Pembuatan kuesioner sederhana yang singkat.
- h. Pembuatan laporan lapang secara cepat.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam RRA, yaitu:

- a. *Efektivitas dan efisiensi*, kaitannya dengan biaya, waktu, dengan perolehan informasi yang dapat dipercaya yang dapat digunakan dibanding sekedar jumlah dan ketepatan serta relevansi informasi yang dibutuhkan.
- b. *Hindari bias*, melalui: introspeksi, dengarkan, tanyakan secara berulang-ulang, tanyakan kepada kelompok termiskin.
- c. *Triangulasi sumber informasi* dan libatkan Tim Multi-disiplin untuk bertanya dalam beragam perspektif.
- d. *Belajar dari dan bersama masyarakat*.
- e. *Belajar cepat melalui eksplorasi, cross-check* dan jangan terpaku pada bekuan yang telah disiapkan.

2. PRA (*Participatory Rural Appraisal*)

PRA merupakan penyempurnaan dari RRA. PRA dilakukan dengan lebih banyak melibatkan “orang dalam” yang terdiri dari semua stakeholders dengan difasilitasi oleh orang-luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator dibanding sebagai instruktur atau guru yang menggurui.

PRA adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa. Atau dengan kata lain dapat disebut sebagai kelompok metode pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak (Chambers, 1996).

Konsepsi dasar pandangan PRA adalah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Metode PRA bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan.

Melalui PRA dilakukan kegiatan-kegiatan:

- a. Pemetaan-wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian keadaan.
- b. Analisis keadaan yang berupa:
 - 1) Keadaan masa lalu, sekarang, dan kecenderungannya di masa depan.
 - 2) Identifikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan alasan-alasan atau penyebabnya.
 - 3) Identifikasi (akar) masalah dan alternatif-alternatif pemecahan masalah.
 - 4) Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau analisis *strength*,

weakness, opportunity, and treat (SWOT) terhadap semua alternatif pemecahan masalah.

- c. Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat diandalkan (dapat dilaksanakan, efisien, dan diterima oleh sistem sosialnya).
- d. Rincian tentang stakeholders dan peran yang diharapkan dari para pihak, serta jumlah dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang akan diusulkan/ direkomendasikan. Alat-alat yang digunakan dalam metoda PRA serupa dengan yang digunakan dalam metode RRA, tetapi berbeda dalam tingkat partisipasi dari masyarakat desa dalam praktik di lapangan. Tidak seperti dalam RRA, masyarakat desa yang dilibatkan dalam PRA memainkan peran yang lebih besar dalam pengumpulan informasi, analisis data dan pengembangan intervensi seperti pada program-program pengembangan masyarakat yang didasarkan pada pengertian terhadap program secara keseluruhan. Proses ini akan memberdayakan masyarakat dan memberi kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan dalam memecahkan masalah mereka sendiri yang lebih baik dibanding dengan melalui intervensi dari luar.

d. Studi Kasus

e. Kesimpulan

f. Daftar Pustaka